



**BADAN
PEMBINAAN
IDEOLOGI
PANCASILA**



LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2025 (*Audited*)





**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
(BPIP)**

BAGIAN ANGGARAN 122

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(AUDITED)

Jalan Veteran III No. 2 Jakarta Pusat 10110



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mempunyai kewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Di sisi lain, laporan keuangan juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 6 Mei 2026

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,



YUDIAN WAHYUDI



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK.....	vi
DAFTAR BAGAN.....	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	ix
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	x
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	3
II. NERACA	4
III. LAPORAN OPERASIONAL	5
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	6
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	7
A. PENJELASAN UMUM.....	7
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	69
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	88
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	104
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	113
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.	116
VI. LAMPIRAN DAN DAFTAR	a



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.	3
Tabel 2. Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024	4
Tabel 3. Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.	5
Tabel 4. Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.	6
Tabel 5. Daftar Pegawai BPIP per 31 Desember 2025.	53
Tabel 6. Perhitungan Penyisihan Piutang yang dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (<i>net realizable value</i>).	63
Tabel 7. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	66
Tabel 8. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	67
Tabel 9. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025.	70
Tabel 10. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025.....	71
Tabel 11. Rincian Belanja berdasarkan Program dan Kegiatan per 31 Desember 2025	72
Tabel 12. Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025 dan 2024.	73
Tabel 13. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai per 31 Desember 2025.	74
Tabel 14. Realisasi dan Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024.	74
Tabel 15. Realisasi dan Perbandingan Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per 31 Desember 2025 dan 2024.	75
Tabel 16. Realisasi dan Perbandingan Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK per 31 Desember 2025 dan 2024.	76
Tabel 17. Realisasi dan Perbandingan Belanja Lembur per 31 Desember 2025 dan 2024.	77
Tabel 18. Realisasi dan Perbandingan Belanja Tunjangan Khusus per 31 Desember 2025 dan 2024.....	77
Tabel 19. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025.	78
Tabel 20. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 2024.	79
Tabel 21. Realisasi Belanja Barang Operasional per 31 Desember 2025 dan 2024.....	79
Tabel 22. Realisasi Belanja Barang Non Operasional per 31 Desember 2025 dan 2024.	80
Tabel 23. Realisasi Belanja Barang Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024.	81
Tabel 24. Realisasi Belanja Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024.	81



Tabel 25. Realisasi Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 2024.	82
Tabel 26. Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri per 31 Desember 2025 dan 2024.	83
Tabel 27. Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri per 31 Desember 2025 dan 2024.	84
Tabel 28. Realisasi Anggaran Belanja Modal per 31 Desember 2025.	84
Tabel 29. Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 2024.....	85
Tabel 30. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024.....	85
Tabel 31. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024.	86
Tabel 32. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024	87
Tabel 33. Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024.	88
Tabel 34. Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024.	89
Tabel 35. Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024.	89
Tabel 36. Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024.	90
Tabel 37. Perbandingan Rincian Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	91
Tabel 38. Perbandingan Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024.....	92
Tabel 39. Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024.	92
Tabel 40. Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025.	93
Tabel 41. Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin.	94
Tabel 42. Rincian Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	94
Tabel 43. Rincian Penghapusan Peralatan dan Mesin.	95
Tabel 44. Rincian Penghentian Aset Dari Penggunaan Peralatan dan Mesin	95
Tabel 45. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 .	96
Tabel 46. Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025.	96
Tabel 47. Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025.	97
Tabel 48. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025.....	98
Tabel 49. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	98



Tabel 50. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025.	99
Tabel 51. Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025.	99
Tabel 52. Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025	100
Tabel 53. Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025.....	101
Tabel 54. Perbandingan Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024.....	101
Tabel 55. Perbandingan Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024	102
Tabel 56. Perbandingan Pendapatan PNBPN per 31 Desember 2025 dan 2024	104
Tabel 57. Perbandingan Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024 ...	105
Tabel 58. Perbandingan Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024	106
Tabel 59. Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024	107
Tabel 60. Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 2024	108
Tabel 61. Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 2024	109
Tabel 62. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	110
Tabel 63. Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 2024	111
Tabel 64. Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional	111
Tabel 65. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas	114
Tabel 66. Realisasi Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2025.....	119
Tabel 67. Realisasi Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN.....	120



★ Nilai Ketuhanan

▨ Nilai Kemanusiaan

🌳 Nilai Persatuan

🇮🇩 Nilai Permasyarakatan

🌱 Nilai Keadilan Sosial

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025. 71



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.....	44
Bagan 2. Struktur Organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Sekretariat Utama)	
.....	44
2.a. Biro Perencanaan dan Keuangan	45
2.b. Biro Hukum dan Organisasi	45
2.c. Biro Umum dan SDM.....	46
2.d. Biro Fasilitas Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	46
2.e. Biro Pengawasan Internal	47
2.f. Pusat Data dan Informasi	47
Bagan 3. Struktur Organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Kedeputian Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan)	48
Bagan 4. Struktur Organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Kedeputian Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi)	49
Bagan 5. Struktur Organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi)	50
Bagan 6. Struktur Organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Kedeputian Bidang Pendidikan dan Pelatihan)	51
Bagan 7. Struktur Organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Kedeputian Bidang Pengendalian dan Evaluasi)	52



DAFTAR SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BUN	:	Bendahara Umum Negara
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LO	:	Laporan Operasional
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
RPATA	:	Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran
SAI	:	Sistem Akuntansi Instansi
SAKTI	:	Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
TA	:	Tahun Anggaran
TAB	:	Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	:	Tahun Anggaran Yang Lalu
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
UP	:	Uang Persediaan



PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Tahun Anggaran 2025 (Audited) berupa Neraca per 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait.

Jakarta, 4 Mei 2026

Kepala Biro Pengawasan Internal,



TRI PURNO UTOMO



Nilai Ketuhanan

Nilai Kemanusiaan

Nilai Persatuan

Nilai Permasyarakatan

Nilai Keadilan Sosial

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 6 Mei 2026

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,



YUDIAN WAHYUDI

**RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Tahun 2025 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp760.835.039,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Negara pada per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp336.456.506.238,00 atau mencapai 89,86% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp374.428.347.000,00. Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp85.843.392.450,00; Belanja Barang sebesar Rp247.576.049.448,00; Belanja Modal sebesar Rp3.037.064.340,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp24.561.070.888,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp2.189.720.202,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp18.396.413.535,00; Aset Lainnya (neto) sebesar Rp3.974.937.151,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.998.180.382,00 dan Rp22.562.890.506,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-



LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp345.479.141.738,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp345.479.141.738,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp340.002.574,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp345.139.139.164,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp33.112.159.071,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp345.139.139.164,00 dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar Rp72.865.452,00 dan transaksi antar entitas senilai total Rp334.662.736.051,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp22.562.890.506,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



Nilai Ketuhanan

Nilai Kemanusiaan

Nilai Persatuan

Nilai Permasyarakatan

Nilai Keadilan Sosial

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025		PERSENTASE (%)	31 DESEMBER 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Bukan Pajak	B.1	0,00	760.835.039,00	0,00	344.717.182,00
JUMLAH PENDAPATAN		0,00	760.835.039,00	0,00	344.717.182,00
BELANJA	B.2				
Belanja Operasional					
Belanja Pegawai	B.3	87.972.120.000,00	85.843.392.450,00	97,58	81.778.562.690,00
Belanja Barang	B.4	282.688.227.000,00	247.576.049.448,00	87,58	225.533.199.728,00
Belanja Modal	B.5	3.768.000.000,00	3.037.064.340,00	80,60	6.875.807.418,00
JUMLAH BELANJA		374.428.347.000,00	336.456.506.238,00	89,86	314.187.569.836,00

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

Jakarta, 6 Mei 2026

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,



YUDIAN WAHYUDI

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



Nilai Ketuhanan

Nilai Kemanusiaan

Nilai Persatuan

Nilai Permasyarakatan

Nilai Keadilan Sosial

II. NERACA**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0,00	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	0,00	0,00
Piutang Bukan Pajak	C.3	72.866.052,00	445.647.063,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang Bukan Pajak	C.4	(72.866.052,00)	(123.977.985,00)
<i>Piutang Bukan Pajak (netto)</i>		0,00	321.669.078,00
Belanja Dibayar di Muka	C.5	40.828.328,00	20.385.078,00
Persediaan	C.6	2.148.891.874,00	2.010.388.192,00
Jumlah Aset Lancar		2.189.720.202,00	2.352.442.348,00
ASET TETAP			
Tanah	C.7	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	C.8	81.060.842.622,00	80.250.490.174,00
Gedung dan Bangunan	C.9	0,00	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.10	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	C.11	172.460.052,00	1.105.801.200,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.12	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.13	(62.836.889.139,00)	(53.115.750.092,00)
Jumlah Aset Tetap		18.396.413.535,00	28.240.541.282,00
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.14	4.570.810.725,00	4.570.810.725,00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.15	1.758.980.382,00	597.565.704,00
Aset Lain-Lain	C.16	156.477.920,00	956.750.180,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.17	(2.511.331.876,00)	(3.008.385.464,00)
Jumlah Aset Lainnya		3.974.937.151,00	3.116.741.145,00
JUMLAH ASET		24.561.070.888,00	33.709.724.775,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.18	0,00	0,00
Utang kepada Pihak Ketiga	C.19	1.998.180.382,00	597.565.704,00
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.20	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.998.180.382,00	597.565.704,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		1.998.180.382,00	597.565.704,00
EKUITAS			
Ekuitas	C.21	22.562.890.506,00	33.112.159.071,00
JUMLAH EKUITAS		22.562.890.506,00	33.112.159.071,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		24.561.070.888,00	33.709.724.775,00

Tabel 2. Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024

Jakarta, 6 Mei 2026

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,

**YUDIAN WAHYUDI****Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**



Nilai Ketuhanan

Nilai Kemanusiaan

Nilai Persatuan

Nilai Permasyarakatan

Nilai Keadilan Sosial

III. LAPORAN OPERASIONAL**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	D.1		
Pendapatan PNPB Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		0,00	0,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	85.843.392.450,00	81.747.242.827,00
Beban Persediaan	D.3	4.146.426.241,00	3.393.932.650,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	122.977.111.098,00	104.390.594.785,00
Beban Pemeliharaan	D.5	4.760.269.485,00	4.720.012.419,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	115.772.495.692,00	113.663.858.176,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	12.030.558.705,00	12.707.707.341,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	(51.111.933,00)	31.409.803,00
JUMLAH BEBAN		345.479.141.738,00	320.654.758.001,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(345.479.141.738,00)	(320.654.758.001,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		11.967.846,00	41.295.375,00
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		328.034.728,00	468.592.940,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		340.002.574,00	509.888.315,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(345.139.139.164,00)	(320.144.869.686,00)
POS LUAR BIASA	D.10		
Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
Beban Luar Biasa		0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT LO		(345.139.139.164,00)	(320.144.869.686,00)

Tabel 3. Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

Jakarta, 6 Mei 2026

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,

**YUDIAN WAHYUDI****Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan BPIP Tahun 2025 (Audited)



Nilai Ketuhanan

Nilai Kemanusiaan

Nilai Persatuan

Nilai Permasyarakatan

Nilai Keadilan Sosial

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
EKUITAS AWAL	E.1	33.112.159.071,00	39.371.190.479,00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(345.139.139.164,00)	(320.144.869.686,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(72.865.452,00)	42.985.624,00
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		0,00	0,00
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI		0,00	0,00
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI		(72.866.052,00)	10.125.000,00
KOREKSI LAIN-LAIN		600,00	32.860.624,00
JUMLAH		(72.865.452,00)	42.985.624,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	334.662.736.051,00	313.842.852.654,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(10.549.268.565,00)	(6.259.031.408,00)
EKUITAS AKHIR	E.6	22.562.890.506,00	33.112.159.071,00

Tabel 4. Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

Jakarta, 6 Mei 2026

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,

**YUDIAN WAHYUDI****Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pendahuluan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Indonesia merupakan negara multikultur yang menjadi rumah bagi berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Setiap daerah memiliki ciri khas budaya dan tradisi unik, mulai dari bahasa, adat istiadat, hingga sistem kepercayaan. Keberagaman ini bukan hanya menjadi identitas bangsa, tetapi juga kekayaan tak ternilai yang mencerminkan betapa luas dan majemuknya Indonesia. Namun, tantangan besar tetap ada dalam menjaga persatuan di tengah perbedaan yang beragam ini. Untuk itu, diperlukan konsepsi atau cita yang mampu menjadi landasan kuat dan inklusif bagi seluruh elemen bangsa, yang mencerminkan keadilan dan menghargai setiap perbedaan yang ada.

Konsepsi atau cita ini mencerminkan inti terdalam suatu negara, yaitu sebagai cita negara (*staatsidee*) dan dasar tatanan hukum negara, sebagai cita hukum (*rechtsidee*). Dalam pidatonya di Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada 31 Desember 1960, yang memperkenalkan Pancasila kepada dunia, Soekarno mengingatkan pentingnya konsepsi dan cita-cita bagi suatu bangsa: *“Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya”*.

Konsepsi kenegaraan dan cita hukum setiap negara-



bangsa memiliki kekhasannya masing-masing sesuai dengan latar kesejarahan, kondisi sosial-budaya, serta karakteristik bangsa yang bersangkutan. Salah satu karakteristik Indonesia sebagai negara-bangsa yang mengikat lebih dari 500 suku bangsa dan bahasa, ragam agama, budaya dan kelas sosial, dan di sepanjang sekitar 17.508 pulau, yang membentang dari 6°08' LU hingga 11°15' LS, dan 94°45' BT hingga 141°05' BT diperlukan suatu konsepsi, kemauan, dan kemampuan yang kuat dan adekuat, yang dapat menopang kebesaran, keluasan, dan kemajemukan keindonesiaan.

Atas segala kebesaran, keluasan, dan kemajemukan itu, bangsa Indonesia harus merumuskan konsepsi tentang dasar negara yang dapat meletakkan segenap elemen bangsa di atas suatu landasan yang statis atau “meja statis”, sekaligus dapat memberi tuntutan yang dinamis, bintang penuntun (*leitstar*). Para pendiri bangsa Indonesia berusaha menjawab tantangan tersebut dengan melahirkan konsepsi negara persatuan yang berwatak gotong-royong, bukan negara perseorangan seperti dalam konsepsi liberalisme-kapitalisme atau negara golongan atau kelas seperti konsepsi komunisme. Dalam ungkapan Soekarno “Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara ‘semua buat semua’, ‘satu buat semua, semua buat satu’. Negara persatuan yang mengatasi paham perseorangan dan golongan, yang melindungi hak dasar segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.



Dengan semangat kekeluargaan itu, konsepsi tentang dasar atau falsafah negara dirumuskan dengan merangkum lima prinsip utama sebagai ‘titik temu’, yang mempersatukan keragaman bangsa, ‘titik pijak’, yang mendasari ideologi dan norma negara, serta ‘titik tuju’, yang memberi orientasi kenegaraan-kebangsaan, negara-bangsa Indonesia. Kelima prinsip utama itu dikenal dengan sebutan Pancasila. Kelima dasar Pancasila itu sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan;
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kehadiran Pancasila sebagai dasar dan falsafah hidup (*weltanschauung*) negara Indonesia merupakan oase bagi keragaman dan keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Pancasila berperan tidak hanya sebagai landasan konstitusi, tetapi juga sebagai panduan moral yang memandu masyarakat dalam berinteraksi dan saling menghargai perbedaan. Dalam hal ini, Pancasila menegaskan nilai-nilai universal seperti keadilan, toleransi, dan persatuan, yang sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis.

Namun, realitas yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini masih jauh dari cita-cita ideal yang diharapkan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Berbagai tantangan, seperti pengaruh globalisasi,



Nilai Ketuhanan



Nilai Kemanusiaan



Nilai Persatuan



Nilai Permasyarakatan



Nilai Keadilan Sosial

meningkatnya sikap eksklusif, kesenjangan ekonomi yang tinggi, serta ancaman segregasi sosial, masih mengemuka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Pancasila sebagai nilai dasar sudah ada, tantangan yang dihadapi masyarakat memerlukan perhatian serius agar nilai-nilai tersebut dapat diaktualisasikan dengan baik.

Dalam situasi seperti ini, kebutuhan untuk melakukan revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila menjadi persoalan urgen untuk dilakukan oleh segenap elemen warga negara, terlebih penyelenggara negara. Eksistensi Indonesia sebagai sebuah republik dituntut untuk berdiri teguh berdasarkan konsep cita negara dan cita hukum yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Pancasila harus dijadikan sebagai “titik temu” yang menyatukan keragaman bangsa, menjadi “titik pijak” yang menjadi dasar ideologi dan norma negara, serta berfungsi sebagai “titik tuju” yang memberikan orientasi dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan. Dengan demikian, penguatan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya sekadar simbol, melainkan harus terwujud dalam tindakan nyata yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila untuk membangun bangsa yang lebih adil, makmur, dan berintegritas.

Kehadiran Pancasila sebagai dasar, dan falsafah atau pandangan hidup (*weltanschauung*) negara Indonesia menjadi oase bagi keragaman dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan konstitusional, tetapi juga sebagai pedoman moral yang membimbing masyarakat dalam berinteraksi dan menghargai perbedaan. Dalam konteks ini, Pancasila menegaskan nilai-nilai universal seperti keadilan,



toleransi, dan persatuan, yang mendorong terciptanya masyarakat yang inklusif dan harmonis.

Namun demikian, kondisi bangsa hingga saat ini masih jauh dari harapan cita ideal tersebut dalam mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan falsafah atau pandangan hidup (*weltanschauung*). Hal ini akibat deraan globalisasi, meningkatnya eksklusivisme, masih tingginya kesenjangan ekonomi, dan ancaman segregasi sosial.

Dalam situasi seperti ini, kebutuhan untuk melakukan revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila menjadi persoalan urgen untuk dilakukan segenap elemen bangsa, baik warga negara terlebih penyelenggara negara. Eksistensi Indonesia sebagai republik dituntut untuk berdiri kokoh di atas konsepsi cita negara dan cita hukum. Oleh karenanya, Pancasila harus menjadi “titik temu” yang mempersatukan keragaman bangsa, menjadi “titik pijak” yang mendasari ideologi dan norma negara, serta menjadi “titik tuju” yang memberi orientasi kenegaraan dan kebangsaan.

**Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis**

Dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah Republik Indonesia memandang perlu dilakukan Pembinaan Ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara yang terencana, sistematis, dan terpadu. Pada 19 Mei 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Namun demikian, UKP-PIP disempurnakan dan direvitalisasi organisasi maupun tugas dan fungsinya dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 perlu diganti dalam



rangka penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada tanggal 28 Februari 2019, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dengan revitalisasi dari bentuk unit kerja menjadi bentuk badan, diharapkan BPIP akan tetap *existing* walaupun pemerintahannya terus berganti. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, maka Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, Program Aksi Presiden/Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 menegaskan bahwa jalan perubahan adalah jalan ideologis yang bersumber pada Proklamasi, Pancasila 1 Juni 1945, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proklamasi dan Pancasila 1 Juni 1945 menegaskan jati diri dan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menegaskan jati diri dan identitas bangsa yang merdeka berdaulat. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.



Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025, dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, (SDM), sains, teknologi, pendidikan,



- kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.



RPJMN 2025-2029 juga memuat matriks pembangunan, matriks K/L, serta arah pembangunan kewilayahan. RPJMN ini akan menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemda dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Dalam hal ini Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto telah menaruh perhatian serius terhadap upaya mengokohkan ideologi Pancasila untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan menempatkannya sebagai prioritas pertama dalam visi dan misi Asta Cita, Presiden beserta seluruh jajaran kabinet Merah Putih hendak menegaskan bahwa upaya penegakan ideologi Pancasila tidak sekadar untuk mengembalikan eksistensi jati diri bangsa yang semakin terkikis, tetapi juga mengembalikan Pancasila sebagai sebuah ideologi yang menuntun lahirnya regulasi, kebijakan, dan berbagai praktik penyelenggara negara yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.

Di sisi lain masih terjadi adanya anggapan Pancasila tak hanya sekadar diselewengkan, akan tetapi malah dianggap kuno. Pancasila sebagai ideologi juga



dianggap gagal, bahkan dianggap tabu untuk dibicarakan. Padahal sejatinya sesuai program teknis Pembinaan Ideologi Pancasila bahwa Pancasila merupakan jati diri bangsa yang terbukti sangat ampuh menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketika negara-bangsa dihadapkan pada berbagai tantangan, pengalaman traumatis dalam penginstrumentasian Pancasila di masa lalu telah mengakibatkan penurunan kepercayaan baik di kalangan penyelenggara negara maupun warga negara terhadap Pancasila. Sampai pada tahun 2022, Pancasila tidak lagi diajarkan sebagai pelajaran wajib di sekolah, dan terdapat kegamangan di kalangan penyelenggara negara dalam mengartikulasikan Pancasila di ruang publik. Kondisi ini menciptakan struktur ruang masuknya moralitas-moralitas partikular, yang berkembang –terutama– melalui media sosial dan internet. Sementara itu, arus globalisasi tata-nilai membawa dampak signifikan berupa pluralisasi, polarisasi, dan fragmentasi ideologi dalam kehidupan kebangsaan yang semakin luas cakupannya, penetrasinya, dan kecepatan yang instan.

Tantangan ini menciptakan kondisi di mana berbagai nilai dan ideologi asing dapat dengan mudah masuk dan memengaruhi masyarakat Indonesia, berpotensi mengikis nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Setidaknya 70% generasi muda di Indonesia lebih terpapar informasi dari media sosial dibandingkan dengan sumber pendidikan formal, menjadikan penyerapan nilai-nilai ideologis lebih rentan dan menyebabkan pergeseran dalam pemahaman ideologi



nasional, di mana nilai-nilai Pancasila sering dianggap tidak relevan. Hal ini juga terlihat dari meningkatnya ekstremisme dan intoleransi, yang mengancam persatuan bangsa. Tanpa adanya perimbangan yang masif dan terstruktur, nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila sulit dipahami secara holistik oleh masyarakat dan generasi muda, khususnya peserta didik.

Oleh karena itu, diperlukan lembaga koordinasi yang bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila secara terpimpin, terencana, terstruktur, sistematis, dan terpadu, serta mengembangkan materi pembelajaran Pancasila yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peserta didik. Selain itu, lembaga ini juga harus memimpin pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila di seluruh lapisan penyelenggara negara dan masyarakat, sehingga penetapan 1 Juni sebagai Hari Pancasila tidak hanya menjadi seremoni, tetapi diisi dengan substansi yang kuat. Dalam konteks ini, pembentukan BPIP menjadi sangat penting sebagai respon terhadap tantangan ini, meskipun tugas badan ini berat di tengah skeptisisme masyarakat. Kehadirannya diharapkan dapat menjawab aspirasi banyak pihak mengenai perlunya usaha pemantapan ideologi Pancasila yang lebih terencana, terstruktur, sistematis, dan masif.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Renstra BPIP merupakan tindak lanjut pasca dibentuknya BPIP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada tanggal 28 Februari 2018. Dalam upaya mewujudkan manfaat yang diamanatkan dalam



Peraturan Presiden tersebut, yakni dalam rangka untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di mana perlu dilakukan Pembinaan Ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggaraan negara dan warga negara. Selain itu, program Pembinaan Ideologi Pancasila hendaknya dilakukan secara terencana, sistematis dan terpadu maka disusunlah Renstra BPIP, Arah Kebijakan Umum, Peta Jalan (*Roadmap*), Rencana Kerja dan Anggaran BPIP.

Penyusunan Renstra BPIP Tahun 2025-2029 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Berdasarkan prosesnya, Renstra BPIP telah disusun melalui tahapan penyusunan rancangan teknokratik, penyusunan rancangan awal, penelaahan rancangan hingga penetapan Renstra BPIP Tahun 2025-2029. Selain itu, penyusunan Renstra BPIP juga memedomani dan menjaga keselarasan dengan RPJPN Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, dan AK PIP, serta evaluasi capaian Renstra BPIP Tahun 2020-2024. Lebih lanjut, penyusunan Renstra BPIP juga telah menggunakan pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*) yang melibatkan seluruh pihak terkait, baik internal BPIP maupun pihak eksternal BPIP.



Renstra BPIP Tahun 2025-2029 telah menganalisis seluruh permasalahan dan potensi serta kekuatan, kelemahan, tantangan dan ancaman yang berpotensi terjadi pada periode 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu, selaras dengan amanat dalam RPJPN, RPJMN, dan AK PIP, BPIP kemudian menetapkan Visi “Terwujudnya penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang transformatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045” dengan dua tujuan yaitu: 1) Mewujudkan kelembagaan dan tata kelola PIP yang menguatkan pengarusutamaan internalisasi, institusionalisasi dan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan 2) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan memberikan pelayanan prima di lingkungan BPIP.

Renstra BPIP merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Tugas, dan Fungsi BPIP sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang kemudian disintesakan dengan hasil analisa situasi tentang kekuatan dan kelemahan internal berdasarkan hasil evaluasi diri yang akurat, serta hasil analisa peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan strategi eksternal.

Hasil sintesis tersebut dapat diidentifikasi berbagai problematika atau isu strategis yang kemudian diteruskan dengan menentukan alternatif pemecahannya dalam bentuk skala prioritas strategis



pengembangan terpilih. Langkah selanjutnya adalah penjabaran dari seluruh butir strategi Pembinaan Ideologi Pancasila, untuk kemudian dituangkan dalam rencana operasional tahunan, Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Jangka Menengah Tahun 2024-2029, dan Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Jangka Panjang Tahun 2025-2045.

Selanjutnya dalam rangka pengembangan kepemimpinan yang demokratis serta menggerakkan partisipasi, Renstra BPIP akan dijadikan tolak ukur guna memberikan arah serta memberikan penilaian tingkat keberhasilan dan kinerja perangkat Pelaksana BPIP dalam semua jenjang dan lini. Renstra BPIP juga diharapkan mampu mengantisipasi dinamika perubahan dan perkembangan internal maupun eksternal serta mampu menjawab berbagai isu strategis yang akan dihadapi negara dan bangsa Indonesia dalam satu dasawarsa mendatang khususnya yang terkait dengan Pembinaan Ideologi Pancasila di seluruh kehidupan bangsa dan negara di seluruh pelosok nusantara.

NILAI

Berdasarkan tugas dan fungsinya secara umum BPIP menaruh dukungan penuh pada Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental dan secara khusus mendukung keberhasilan pencapaian Program Gerakan Indonesia Bersatu yang difokuskan kepada: a. peningkatan perilaku yang mendukung kehidupan demokrasi Pancasila; b. peningkatan perilaku toleran dan kerukunan inter dan antar umat beragama; c. peningkatan perilaku yang mendukung kesadaran



nasionalisme, patriotisme, dan kesetiakawanan sosial; d. peningkatan kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa; e. peningkatan perilaku yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kaum minoritas, marjinal, dan berkebutuhan khusus; f. peningkatan dukungan terhadap inisiatif dan peran masyarakat dalam pembangunan; g. peningkatan perilaku kerja sama inter dan antar lembaga, komponen masyarakat dan lintas sektor; h. peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa; i. penyelenggaraan pendidikan agama yang mengajarkan keragaman, toleransi, dan budi pekerti; j. peningkatan peran lembaga agama, keluarga, dan media publik dalam persemaian nilai-nilai budi pekerti, toleransi, dan hidup rukun.

Sejalan hal tersebut di atas BPIP menetapkan nilai-nilai organisasi sebagai berikut:

1. Andal

Dapat dipercaya akan kesanggupan, kekuatan dan kemampuannya;

2. Profesional

Memiliki keahlian dan keterampilan di bidang yang ia kerjakan, juga mendalami dan berkomitmen tinggi atas pekerjaannya;

3. Inovatif

Mencurahkan segala kemampuan diri dalam berpikir untuk menciptakan pembaruan bagi diri sendiri maupun masyarakat dan lingkungan sekitar;

4. Integritas

Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan



prinsip-prinsip moral.

VISI

Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 maka BPIP menetapkan visi yaitu:

“Terwujudnya penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang transformatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”.

Dengan visi tersebut, BPIP secara strategis akan melakukan berbagai upaya melalui berbagai program kebijakan PIP untuk mendukung terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045” berbasis pemanfaatan sumber daya manusia unggul.

MISI

Dalam rangka mencapai Misi BPIP ditetapkan sebagai berikut:

“mendukung misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM pada tahun 2025-2029”

Dalam melaksanakan tugas, BPIP menyelenggarakan fungsi:

1. Melaksanakan PIP;

Misi kesatu yaitu melaksanakan PIP akan dilaksanakan dengan beberapa langkah berikut:

- a. Memperkuat hubungan antarlembaga dan kerja sama, layanan sosialisasi dan komunikasi serta



- penguatan jaringan dan pembudayaan Pancasila;
- b. Melaksanakan penyelarasan hukum, layanan advokasi, dan pengawasan regulasi agar berlandaskan Pancasila;
 - c. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian dan evaluasi arah kebijakan dan peta jalan PIP;
 - d. Melakukan pengkajian, penyediaan, dan penyusunan standardisasi materi PIP;
 - e. Melaksanakan pengkajian dan materi PIP dari jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan menengah serta pendidikan tinggi;
 - f. Menyelenggarakan Diklat PIP; dan
 - g. Melaksanakan pengukuran dan pengendalian serta evaluasi PIP.
2. Memperkuat RB dalam tata kelola pemerintahan di BPIP.

Misi kedua yaitu memperkuat RB dalam tata kelola pemerintahan di BPIP akan ditempuh dengan beberapa langkah berikut:

- a. Meningkatkan penerapan SPBE;
- b. Menguatkan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN;
- c. Meningkatkan penguatan manajemen risiko;
- d. Meningkatkan kualitas layanan perencanaan dan keuangan;
- e. Penguatan regulasi internal dan tata laksana organisasi; dan
- f. Meningkatkan kualitas layanan umum dan kearsipan.



TUJUAN

Untuk menerjemahkan visi dan misi yang telah ditetapkan, berikut tujuan yang ingin dicapai BPIP pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yaitu:

1. Mewujudkan kelembagaan dan tata kelola PIP yang menguatkan pengarusutamaan internalisasi, institusionalisasi, dan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
2. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dengan SDM yang berintegritas tinggi, produktif, dan memberikan pelayanan prima di lingkungan BPIP dengan indikator kerja Nilai Reformasi Birokrasi.

SASARAN

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, BPIP kemudian menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis guna menjawab tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yang akan menunjukkan tercapainya kondisi yang diharapkan pada periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Adapun sasaran strategis beserta indikator kinerja yang akan dicapai pada periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yaitu:

1. Terwujudnya praktik luhur nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengukuran capaian sasaran strategis ini menggunakan indikator kinerja IAP;
2. Terwujudnya BPIP sebagai koordinator internalisasi dan institusionalisasi nilai Pancasila



dalam kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan. Pengukuran capaian sasaran strategis ini menggunakan indikator kinerja Indeks Pelembagaan Pancasila (IPP); dan

3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif (BerAKHLAK) dan pelayanan prima berbasis elektronik. Pengukuran sasaran strategis ini menggunakan 6 (enam) indikator kinerja, yaitu: Nilai RB, Nilai Implementasi SAKIP, Nilai Sistem Merit, Opini atas LK, Indeks SPBE, dan IKM. Indikator-indikator tersebut menjadi ukuran kondisi tata kelola pemerintahan di lingkungan BPIP berjalan dengan bersih, berintegritas, produktif, dan memberikan pelayanan prima berbasis elektronik.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi nasional yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029, arah kebijakan dan strategi BPIP sejalan dengan AK PIP yang merupakan dokumen pengembangan kebijakan PIP yang bersifat strategis, yang dilaksanakan secara sistematis, bertahap, dan berkesinambungan. Selain itu, pembangunan karakter bagi generasi penerus bangsa melalui penerapan pendidikan Pancasila pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan menengah serta pendidikan tinggi, sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penerapan pendidikan Pancasila



Nilai Ketuhanan



Nilai Kemanusiaan



Nilai Persatuan



Nilai Permasyarakatan



Nilai Keadilan Sosial

jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilakukan melalui penyusunan standardisasi materi pembelajaran pendidikan Pancasila, sedangkan untuk penerapan pendidikan Pancasila pada pendidikan tinggi dilakukan melalui penyusunan pedoman pembelajaran pendidikan Pancasila pada kurikulum pendidikan Pancasila jenjang pendidikan tinggi.

AK PIP disusun dengan ruang lingkup tinjauan lingkungan strategis yang terdiri atas: (1) histori kelembagaan PIP era pemerintahan Sukarno dan era pemerintahan Suharto hingga reformasi; (2) kedudukan ideologi Pancasila dalam perencanaan pembangunan nasional, (3) bonus demografi generasi Z dan *post-Z*; (4) globalisasi, demokratisasi, penyebaran paham ekstrem, dan hegemoni budaya asing; serta (5) realitas perekonomian Indonesia yang masih timpang dan meninggalkan kesadaran hubungan Tuhan, manusia, dan alam.

AK PIP menetapkan sejumlah tujuan dengan kebijakan sebagai berikut: Tujuan 1: Terciptanya kehidupan perekonomian yang berasaskan keadilan kekeluargaan dan gotong royong: a. menciptakan atau membentuk ekosistem badan usaha yang mencerminkan asas kekeluargaan dan gotong royong; b. melakukan evaluasi terhadap seluruh aturan yang ada terkait kesesuaian dengan asas kekeluargaan dan gotong royong; c. memasukkan unsur kekeluargaan dan gotong royong ke dalam setiap peraturan yang akan disusun oleh pemerintah/badan usaha; d. mengkampanyekan pembudayaan sistem ekonomi berdasarkan Pancasila; dan e. memasukkan konsep sistem ekonomi berdasarkan Pancasila dalam kurikulum pembelajaran mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Tujuan 2: Semakin menguatnya peran koperasi serta UMKM dalam sistem perekonomian nasional: a.



pengadaan akses finansial bagi koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah yang mudah dan terjangkau; b. pendampingan pengembangan usaha, insentif pajak rendah, dan adopsi teknologi untuk menciptakan efisiensi bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan c. penyediaan pasar bagi koperasi serta UMKM. Tujuan 3: Terciptanya ekosistem usaha yang adil: a. pemberian bantuan/insentif bagi ekspansi koperasi dan UMKM; b. pendampingan dan pengembangan pemain lokal (*local champion*) yang memimpin pasar dalam negeri; c. mendorong kemitraan koperasi dan UMKM lokal dengan usaha besar dan pengaturan penyerapan konten lokal; dan d. pengawasan terhadap penguasaan pasar. Tujuan 4: Pemanfaatan sumber daya alam dan energi sebagai pokok kemakmuran rakyat: a. penyempurnaan regulasi terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia yang berorientasi pada Pancasila dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945; b. meningkatkan kepemilikan negara dalam usaha pengelolaan barang tambang dan mineral yang bersifat strategis melalui BUMN; c. menumbuhkan koperasi sebagai unit usaha pengelolaan barang tambang di berbagai daerah di Indonesia; d. menginisiasi tersusunnya konsep audit etik bagi pejabat publik dan penyelenggara negara; e. pelaksanaan transfer teknologi dan keterampilan di bidang pertambangan dan energi oleh perusahaan-perusahaan asing terkait sebagai syarat investasi; f. penguatan regulasi terkait kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan (K3L) dalam pengelolaan tambang di Indonesia; dan g. peningkatan peran masyarakat adat dalam setiap pengambilan keputusan terkait pengelolaan SDA di daerahnya. Tujuan 5: Terpenuhinya hak setiap WNI atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan: a. penyediaan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap angkatan kerja Indonesia yang tersedia; b. reformasi program kesejahteraan sosial; c. reviu terkait peraturan ketenagakerjaan untuk mencari formulasi kebijakan yang



tepat dan berimbang yang dapat meningkatkan martabat tenaga kerja Indonesia; d. pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran peraturan ketenagakerjaan; dan e. peningkatan akses dan kualitas aspek kesehatan dan pendidikan.

KERANGKA REGULASI

Untuk mendukung penyusunan perencanaan yang lebih berkualitas, dukungan kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu dengan mengusulkan pembentukan dan/atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan, yang dikemukakan berikut ini:

1. Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum;
3. Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;
4. Peraturan Presiden tentang Indeks Aktualisasi Pancasila;
5. Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, Hubungan Antarlembaga, dan Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Revisi);
7. Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Revisi);



8. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Revisi);
9. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Revisi);
10. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP) dan Peta Jalan (*Roadmap*) Pembinaan Ideologi Pancasila;
11. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila;
12. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
13. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Standar Materi Pembelajaran Pancasila;
14. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Standar Metodologi Pembelajaran Pancasila;
15. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;
16. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Kelompok Ahli (Revisi);
17. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Dewan Pakar;
18. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan



Pembinaan Ideologi Pancasila;

19. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama dalam Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;
20. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
21. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;
22. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pimpinan dan Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
23. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan dan Pertanggungjawaban Kegiatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
24. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pelaksanaan Keprotokolan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
25. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Pakar, Kelompok Ahli, dan Satuan Tugas Khusus.

KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi BPIP sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, BPIP harus didukung oleh seperangkat



organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada BPIP secara efektif dan efisien. Untuk itu, kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

Dalam rangka menjaga agar organisasi BPIP mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat, efektif, dan efisien, BPIP juga perlu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan publik. Selain itu, BPIP perlu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan mutu pembinaan ideologi, baik kepada penyelenggara negara maupun warga negara. Untuk itu, BPIP memerlukan sumber daya aparatur yang tepat secara kualitas maupun kuantitas. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu selalu dilakukan monitoring, evaluasi, dan penataan di bidang organisasi dan sumber daya aparatur yang berkelanjutan.

BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. BPIP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPIP dipimpin oleh Kepala dan dibantu oleh Wakil Kepala.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila secara



Nilai Ketuhanan



Nilai Kemanusiaan



Nilai Persatuan



Nilai Permasyarakatan



Nilai Keadilan Sosial

menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. Adapun fungsi BPIP terdiri dari:

- 1) perumusan arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 2) penyusunan peta jalan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 3) penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 4) koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 5) pengaturan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 6) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 7) pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 8) pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila;
- 9) advokasi penerapan Pembinaan Ideologi Pancasila



dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi;

- 10) penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; dan
- 11) perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, susunan organisasi BPIP terdiri dari:

1. Pengarah

Struktur organisasi BPIP terdiri dari Dewan Pengarah dan Pelaksana. Dewan Pengarah terdiri dari 8 orang yang mewakili tokoh kenegaraan, tokoh agama dan masyarakat, dan tokoh purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketua Dewan Pengarah dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pengarah melalui mekanisme internal Dewan Pengarah.

Dewan Pengarah bertugas memberikan arahan kepada pelaksana terkait arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Dalam rangka mendukung dan membantu mengefektifkan pelaksanaan tugas, Dewan Pengarah dapat dibantu oleh:

- a. dewan pakar;
- b. staf khusus; dan
- c. satuan tugas khusus.



2. Pelaksana

Pelaksana terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Sekretariat Utama;
- d. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan;
- e. Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi;
- f. Deputi Bidang Pengkajian dan Materi;
- g. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
- h. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
- i. Pusat Data dan Teknologi Informasi.

Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP. Dalam melaksanakan tugas, Kepala dibantu Wakil Kepala dapat membentuk Peraturan BPIP dan peraturan lainnya setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah. Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin BPIP. Kepala dapat mengangkat kelompok ahli untuk membantu Deputi dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara teknis serta substantif sesuai dengan bidang penugasannya atas persetujuan ketua Dewan Pengarah.

Pada unsur organisasi sebagai pendukung maka Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPIP. Sedangkan fungsi Sekretariat Utama sebagai berikut:

1. Koordinasi kegiatan di lingkungan BPIP;



2. Koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan BPIP;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administratif yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
7. Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan BPIP; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja, pengelolaan verifikasi, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan.
- b. Biro Hukum dan Organisasi;
Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum, dokumentasi dan informasi hukum, evaluasi, penelaahan dan pendampingan hukum, pembinaan, penataan organisasi, dan pembinaan tata laksana serta reformasi birokrasi.



Nilai Ketuhanan



Nilai Kemanusiaan



Nilai Persatuan



Nilai Permasyarakatan



Nilai Keadilan Sosial

- c. Biro Umum dan Sumber Daya Manusia;
Biro Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kerumahtanggaan, layanan kesehatan, pengamanan dalam, layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, pengelolaan barang milik negara, pembinaan mental sumber daya manusia, dan pengelolaan karier serta kinerja sumber daya manusia.
- d. Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi;
Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitas kerumahtanggaan, keprotokolan, dan pengamanan Pimpinan, pengelolaan hubungan masyarakat serta pengaduan masyarakat, dan pengelolaan pelayanan administrasi.
- e. Biro Pengawasan Internal.
Biro Pengawasan Internal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BPIP.

Pada tingkat pelaksanaan pengorganisasian, masing-masing Kedeputian memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan
 - a. Tugas
Melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan Pembinaan Ideologi Pancasila.
 - b. Fungsi



- 1) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program strategis dan program kerja Pembinaan Ideologi Pancasila dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
- 2) pengoordinasian relawan gerakan kebajikan Pancasila;
- 3) pembudayaan gotong-royong di tengah masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila;
- 4) pelaksanaan sosialisasi Pancasila atau menyebarluaskan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi budaya;
- 5) pengembangan komunikasi dengan media massa;
- 6) peningkatan kerja sama dan hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah;
- 7) pengembangan hubungan dengan organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya dalam rangka menggalang partisipasi komunitas; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga,



Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan terdiri atas:

- a. Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama;
 - b. Direktorat Sosialisasi dan komunikasi; dan
 - c. Direktorat Jaringan dan Pembudayaan.
2. Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi
- a. Tugas
Melaksanakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi.
 - b. Fungsi
 - 1) perumusan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi;
 - 2) penyelenggaraan institusionalisasi Pancasila terhadap hukum nasional agar selaras dengan dasar negara;
 - 3) pemberian rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan dan kajian kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah mengenai regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila;
 - 4) pelaksanaan advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila pada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
 - 5) penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala



dalam Pembinaan Ideologi Pancasila; dan

- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi terdiri atas:

- a. Direktorat Analisis dan Penyelarasan;
- b. Direktorat Advokasi; dan
- c. Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi.

3. Deputi Bidang Pengkajian dan Materi

a. Tugas

Menyelenggarakan perumusan arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila, pengkajian dan perumusan standardisasi materi Pembinaan Ideologi Pancasila.

b. Fungsi

- 1) perumusan arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 2) penyusunan peta jalan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 3) pengkajian pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 4) perumusan standardisasi materi dan bahan ajar metode Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 5) pelaksanaan identifikasi nilai ideologi Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan



daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;

- 6) koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 7) penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Deputi Bidang Pengkajian dan Materi terdiri atas:

- a. Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - b. Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila; dan
 - c. Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila.
4. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan
- a. Tugas
Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.
 - b. Fungsi
 - 1) penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - 2) penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - 3) penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;



- 4) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi aparatur negara, anggota organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan

Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

- a. Direktorat Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan; dan
- c. Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan.

5. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi

a. Tugas

Melaksanakan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila.

b. Fungsi

- 1) pengendalian pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 2) pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 3) pelaksanaan pengukuran pelemagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara;
- 4) pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan Pembinaan



Ideologi Pancasila; dan

- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Direktorat Pengendalian; dan
- b. Direktorat Evaluasi.

Pusat Data dan Teknologi Informasi merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP, Pusat Data dan Teknologi Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama. Pusat Data dan Teknologi Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat. Pusat Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi dan pengembangan sistem informasi berbasis kemajuan teknologi dalam penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Jabatan fungsional dapat ditetapkan di lingkungan BPIP sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Dalam rangka pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional, Kepala menetapkan koordinator dan subkoordinator serta pembidangan kelompok jabatan fungsional. Koordinator dan subkoordinator mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan sesuai

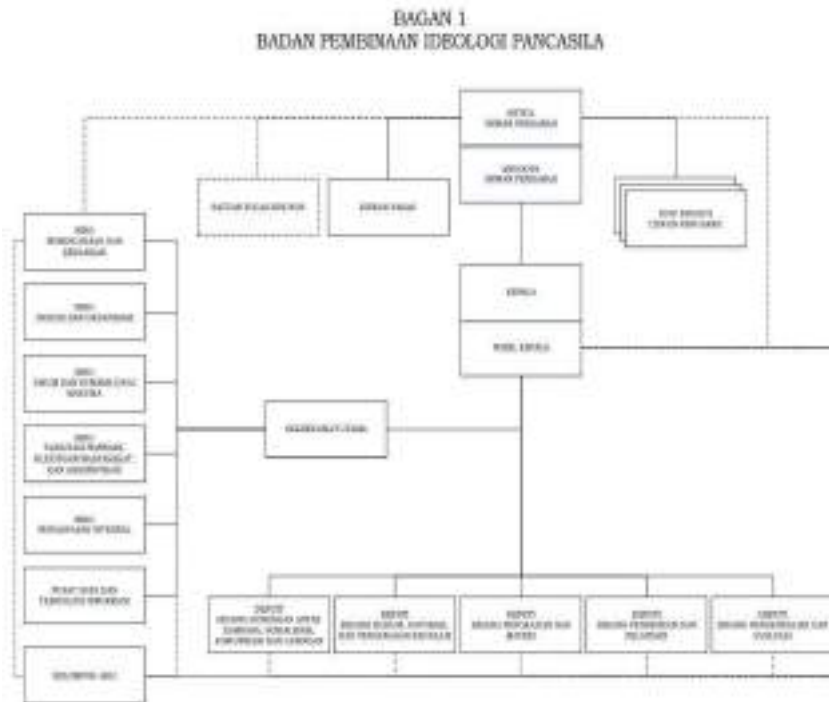


dengan pembidangnya. Jumlah kelompok jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

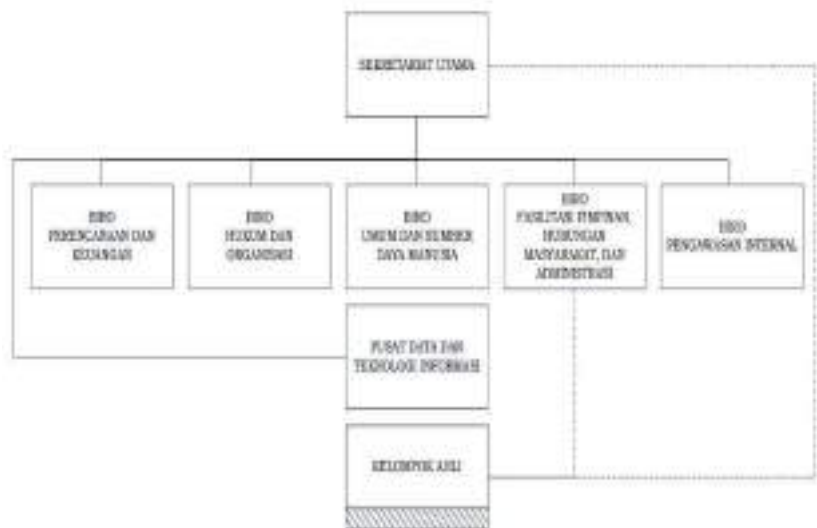
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPIP menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BPIP.



Bagan 1. Struktur Organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

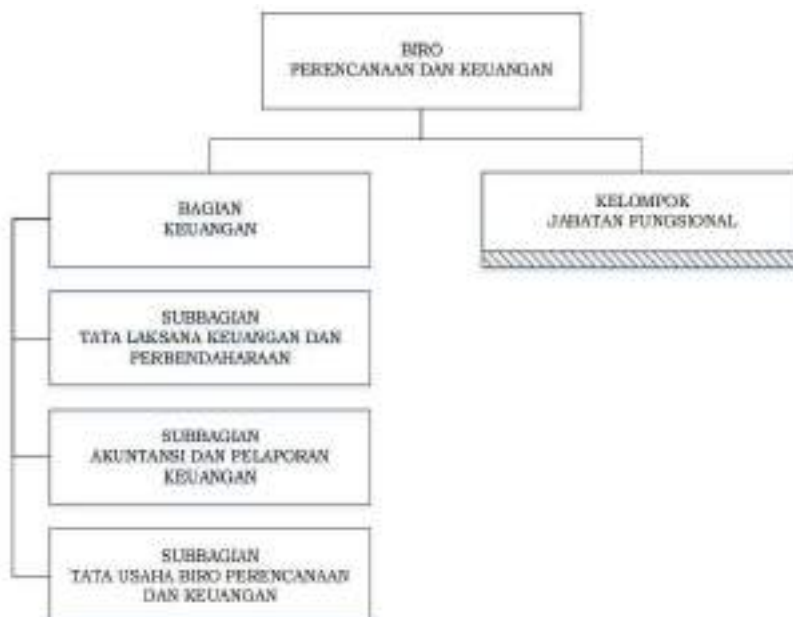


Bagan 2. Sekretariat Utama

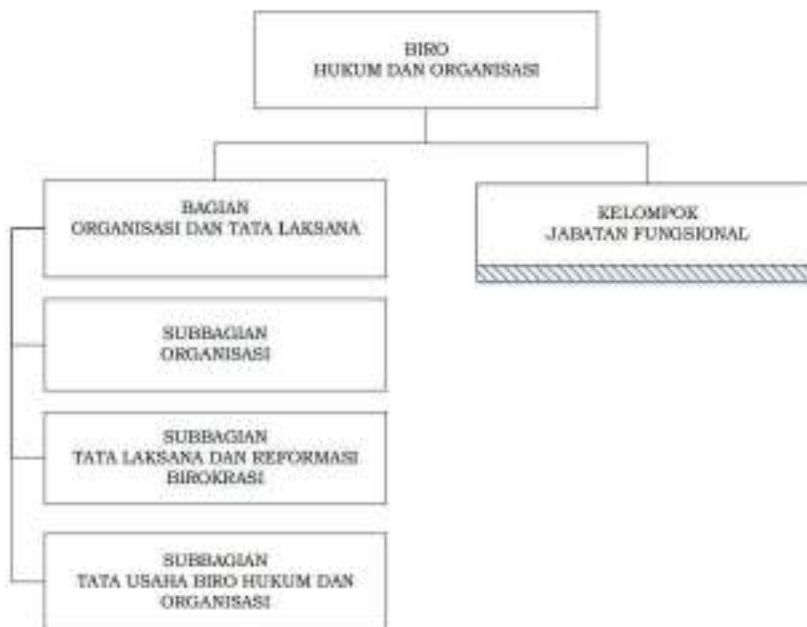




Bagan 2 a. Biro Perencanaan dan Keuangan

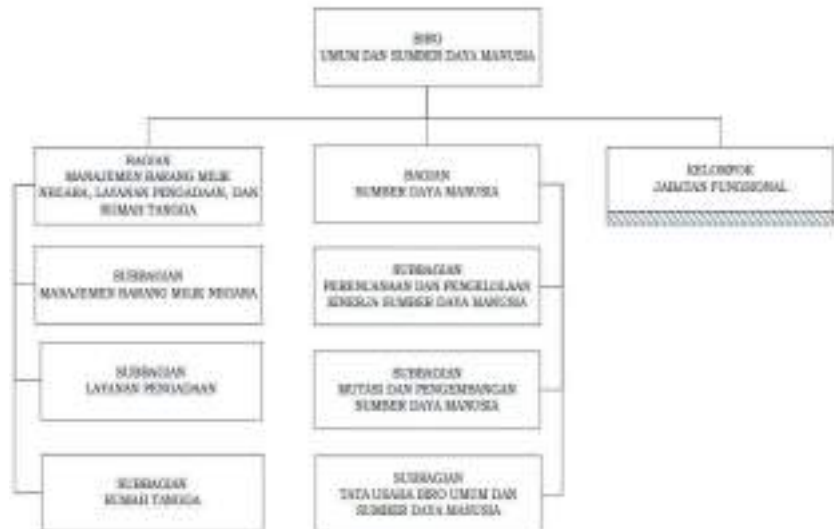


Bagan 2 b. Biro Hukum dan Organisasi





Bagan 2 c. Biro Umum dan SDM



Bagan 2 d. Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi





Bagan 2 e. Biro Pengawasan Internal

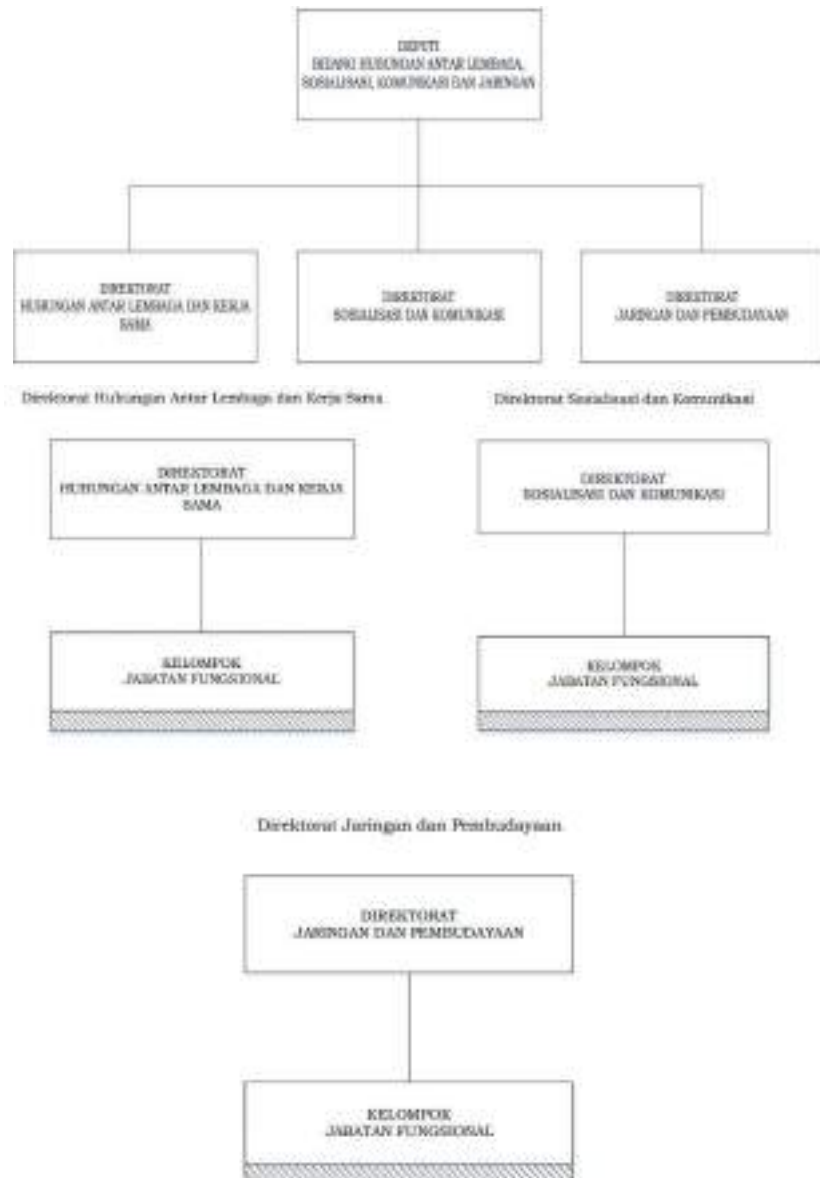


Bagan 2 f. Pusat Data dan Informasi





Bagan 3. Kedeputan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan





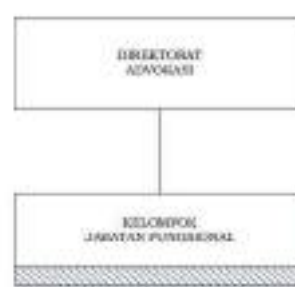
Bagan 4. Kedeputan Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi



Direktorat Analisis dan Penyelarasan



Direktorat Advokasi



Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi





Bagan 5. Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi



Struktur Organisasi Direktorat Pengkajian Kerangka Pemerintahan Ekologi Pangasala



Struktur Organisasi Direktorat Pengkajian Materi Pemerintahan Ekologi Pangasala

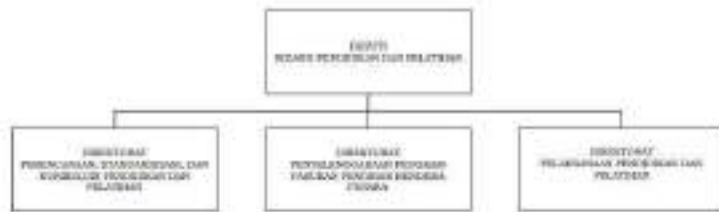


Struktur Organisasi Direktorat Pengkajian Implementasi Pemerintahan Ekologi Pangasala





Bagan 6. Kedeputan Bidang Pendidikan dan Pelatihan



DIREKTORAT
PERENCANAAN,
STANDARISASI, DAN
KURIKULUM PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN

DIREKTORAT
PENYELENGGAAAN PROGRAM
PASUKAN PENGHAR BERENDRA
PUSAKA

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

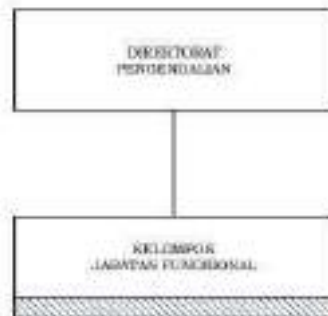
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

DIREKTORAT
PERENCANAAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL



Bagan 7. Kedeputan Bidang Pengendalian dan Evaluasi





Sumber Daya Manusia di Lingkungan BPIP berjumlah 449 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Pegawai BPIP Menurut Jabatan

No.	Uraian	Jumlah Pegawai	Persentase
1	Dewan Pengarah	8	1,8%
2	Dewan Pakar	3	0,7%
3	Dewan Khusus	1	0,2%
4	Kepala	1	0,2%
5	Wakil Kepala	1	0,2%
6	Sekretaris Utama	1	0,2%
7	Deputi	3	0,7%
8	Direktur	13	2,9%
9	Kepala Biro	5	1,1%
10	Kepala Pusat	0	0,0%
11	Administrator	7	1,6%
12	Pengawas	26	5,8%
13	Fungsional Ahli Utama	0	0,0%
14	Fungsional (PNS & PPPK)	197	43,9%
15	Pelaksana	177	39,4%
16	Polisi	6	1,3%
TOTAL		449	100%

Pegawai PNS BPIP Menurut Pangkat

No.	Uraian	Jumlah Pegawai	Persentase
1	Pengatur Muda (II/a)	15	3,5%
2	Pengatur (II/c)	39	9,2%
3	(III/d)	1	0,2%
4	Penata Muda (III/a)	165	38,7%
5	Penata Muda Tingkat I (III/b)	109	25,6%
6	Penata (III/c)	6	1,4%
7	Penata Tingkat I (III/d)	18	4,2%
8	Pembina (IV/a)	16	3,8%
9	Pembina Tingkat I (IV/b)	30	7,0%
10	Pembina Utama Muda (IV/c)	11	2,6%
11	Pembina Utama Madya (IV/d)	15	3,5%
12	Pembina Utama (IV/e)	1	0,2%
TOTAL		426	100%

Tabel 5. Daftar Pegawai BPIP per 31 Desember 2025.



**Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan**

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 (*Audited*) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPIP. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi terdiri dari Unit Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN). Pembentukan kedua unit akuntansi dan pelaporan sebagai bagian dari *check and balance* pengendalian internal di masing-masing unit akuntansi dan pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terdiri dari:

1. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang berada pada tingkat Satuan Kerja;
2. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran (UAPA) yang berada pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga.

Unit Akuntansi dan Pelaporan BMN terdiri dari:

1. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) pada tingkat Satuan Kerja;
2. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang (UAPB) yang berada pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan atas



pelaksanaan anggaran tersebut menghasilkan laporan keuangan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimilikinya sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Unit Akuntansi dan Pelaporan BMN melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan atas pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara tersebut menghasilkan laporan BMN yang selain digunakan untuk bahan penyusunan LO, LPE, dan Neraca juga dapat digunakan untuk tujuan manajerial.

Berikut ini merupakan konstruksi proses akuntansi penyusunan Laporan Keuangan:

- 1) Verifikasi dokumen sumber utama atas terjadinya transaksi keuangan di lingkup entitas pemerintah terdapat pada UAKPA. Dokumen sumber yang digunakan untuk menyusun Laporan Keuangan di tingkat UAKPA:
 - (a). Dokumen terkait dengan transaksi penerimaan terdiri dari:
 - Estimasi Pendapatan yang dialokasikan antara lain: DIPA, DIPA Revisi, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA; dan
 - Realisasi Pendapatan, antara lain: bukti penerimaan negara seperti SSBP, SSP, SSPCP, dan dokumen lain yang sah dipersamakan.
 - (b). Dokumen yang terkait dengan transaksi pengeluaran yang terdiri dari:
 - DIPA, DIPA Revisi, Petunjuk Operasional Kerja dan dokumen lain yang



dipersamakan;

- Realisasi pengeluaran: SPP, SPM, dan SP2D, SP2HL dan SPHL, SP4HL dan SP3HL, MPHL-BJS, dan dokumen lain yang dipersamakan.
- (c). Memo Penyesuaian yang digunakan dalam rangka pembuatan jurnal penyesuaian untuk transaksi akrual dan jurnal aset;
- (d). Dokumen yang terkait transaksi piutang, antara lain kartu piutang, daftar rekapitulasi piutang dan daftar umur piutang;
- (e). Dokumen yang terkait transaksi persediaan, antara lain kartu persediaan, buku persediaan, BAR Opname fisik, Laporan Hasil Opname Fisik (LHOF), dan laporan persediaan, dan daftar perhitungan penyisihan piutang tak tertagih;
- (f). Dokumen yang terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), antara lain Kartu KDP, Laporan KDP;
- (g). Dokumen lainnya dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga seperti Berita Acara Serah Terima (BAST), Surat Keputusan (SK) Penghapusan, SK Penghentian dan/atau Penggunaan Kembali atas Aset Tetap/Aset Tak Berwujud yang dalam kondisi rusak berat, dan lain sebagainya.
- 2) Rekonsiliasi adalah proses pencocokan dan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi pada unit



Akuntansi dan Pelaporan instansi dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

(a). Rekonsiliasi Internal

Rekonsiliasi Internal adalah rekonsiliasi data untuk penyusunan laporan keuangan yang dilaksanakan antar subsistem pada masing-masing Unit Akuntansi dan Pelaporan dan/atau antar Unit Akuntansi dan Pelaporan yang masih dalam satu entitas pelaporan. Termasuk sebagai rekonsiliasi internal adalah rekonsiliasi antara unit pelaporan keuangan dengan unit pelaporan barang serta rekonsiliasi internal antara UAKPA dan Bendahara.

(b). Rekonsiliasi Eksternal

Rekonsiliasi Eksternal adalah rekonsiliasi data untuk penyusunan laporan keuangan yang dilaksanakan antara Unit Akuntansi dan pelaporan yang satu dengan Unit Akuntansi dan Pelaporan yang lain atau pihak lain yang terkait, tidak dalam satu entitas pelaporan.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga menghasilkan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode;

2) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai



Nilai Ketuhanan



Nilai Kemanusiaan



Nilai Persatuan



Nilai Permasyarakatan



Nilai Keadilan Sosial

aset, kewajiban, dan ekuitas per tanggal tertentu;

3) Laporan Operasional

Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan;

4) Laporan Ekuitas

Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya;

5) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta informasi lainnya yang diperlukan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

BPIP menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan



(SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPIP dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 *Audited* telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPIP.



Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPIP sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BPIP adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah



dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.



Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
 - Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:



KUALITAS PIUTANG	URAIAN	PENYISIHAN
LANCAR	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
KURANG LANCAR	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
DIRAGUKAN	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
MACET	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Tabel 6. Perhitungan Penyisihan Piutang yang dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat menggunakan metode *First In First Out (FIFO)*, di mana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar.
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya;
 - Inventarisasi fisik (*stock opname*) persediaan dilakukan setiap semester;
 - Nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (*sequential*) masuk persediaan;
 - Transaksi Koreksi Jumlah yang bersifat menambah kuantitas persediaan dalam neraca diperlakukan sebagaimana perolehan persediaan baru, sesuai tanggal buku



perekaman transaksi Koreksi Jumlah tersebut;

- Transaksi Koreksi Jumlah yang berdampak pada pengurangan kuantitas persediaan di neraca diperlakukan sebagaimana transaksi mutasi persediaan keluar menggunakan harga satuan sesuai urutan perolehan persediaan dimaksud;
- Koreksi Nilai hanya dapat dilakukan atas persediaan yang masih terdapat saldonya;
- Atas persediaan yang bersifat unik dan memerlukan pencatatan spesifik seperti barang persediaan dengan tujuan untuk diserahkan dengan spesifikasi yang berbeda-beda agar dilakukan pencatatan dengan menggunakan kode barang yang berbeda untuk menjaga validitas harga masing-masing barang.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah,



Jalan/Irigasi/Jaringan, dan Aset Tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Kegiatan Operasional Pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu Aset Tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan



menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

KELOMPOK ASSET TETAP	MASA MANFAAT
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 Tahun

Tabel 7. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain Aset Lancar, Aset Tetap, dan Piutang Jangka Panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh



tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2019 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

KELOMPOK ASET TAK BERWUJUD	MASA MANFAAT
Software	4 Tahun
Franchise	5 Tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 Tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 Tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	25 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 Tahun

Tabel 8. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

- Aset Lain-lain berupa Aset Tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

**Kewajiban****(6) Kewajiban**

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Presiden memberikan arahan pada suatu kesempatan konsep “*Send-Deliver*” dalam melaksanakan program- program pembangunan, Presiden menegaskan bahwa tugas pemerintah adalah menjamin program pemerintah telah diterima bukan hanya menjamin telah dikirim, di mana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bukan hanya dibuat namun dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Bapak Presiden juga menyampaikan tentang pentingnya *sense of crisis* di mana meminta menjalankan perencanaan yang baik dalam semua kebijakan.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 perihal Tindaklanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, BPIP melaksanakan efisiensi belanja sebesar Rp191.554.339.000,00, sampai dengan 31 Desember 2025 masih terdapat blokir pagu senilai Rp22.268.908.803,00 (tidak digunakan).

Realisasi Pendapatan B.1 Pendapatan **Rp760.835.039,00**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp760.835.039,00 atau mencapai 0,00 persen dari



estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Realisasi Pendapatan berasal dari Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha sebesar Rp60.018.700,00; Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan sebesar Rp37.946.800,00; dan Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp662.869.539,00 sebagai berikut:

URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	0,00	60.018.700,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	60.018.700,00
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0,00	37.946.800,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0,00	37.946.800,00
Pendapatan Lain-Lain	0,00	662.869.539,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	622.500.981,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	40.368.558,00
Jumlah	0,00	760.835.039,00

Tabel 9. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025.

Terdapat Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp60.018.700,00, Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai sebesar Rp37.946.800,00, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp40.368.558,00, dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp622.500.981,00 yang terlampir dalam lampiran VI.b.

Realisasi Belanja
Rp336.456.506.238,00

B.2. Belanja

Realisasi Belanja BPIP pada per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp336.456.506.238,00 atau 89,86 persen dari anggaran belanja sebesar Rp374.428.347.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2025 tersaji sebagai berikut:

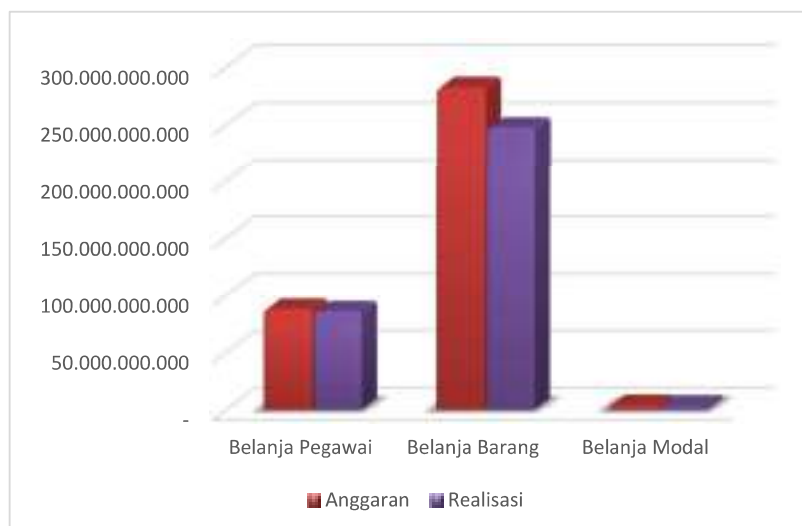


Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	87,972,120,000.00	85,877,421,730.00	97.62
Belanja Barang	282,688,227,000.00	253,149,448,203.00	89.55
Belanja Modal	3,768,000,000.00	3,037,064,340.00	80.60
Total Belanja Kotor	374,428,347,000.00	342,063,934,273.00	91.36
Pengembalian Belanja	0.00	(5,607,428,035.00)	0.00
Total Belanja Netto	374,428,347,000.00	336,456,506,238.00	89.86

Tabel 10. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025.

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Grafik 1. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025.

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:



PROGRAM/KEGIATAN			PER 31 DESEMBER 2025		
			ANGGARAN	REALISASI	%Real Angg.
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA			374.428.347.000,00	342.063.934.273,00	91,36%
Program Pembinaan Ideologi Pancasila			178.953.120.000,00	160.952.977.275,00	89,94%
6926	Penyelenggaraan Program Strategis Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Pembudayaan Ideologi Pancasila		86.368.304.000,00	77.528.038.480,00	89,76%
	ABN	Kebijakan Bidang Sosial	6.192.816.000,00	5.989.980.842,00	96,72%
	BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	25.000.000.000,00	24.983.059.697,00	99,93%
	QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	20.842.896.000,00	20.355.993.723,00	97,66%
	QMB	Komunikasi Publik	34.332.592.000,00	26.199.004.218,00	76,31%
6927	Pelaksanaan Analisis dan Penyelarasan Hukum, Advokasi, serta Pengawasan Regulasi		13.417.175.000,00	11.810.634.885,00	88,03%
	ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	2.112.366.000,00	2.099.585.807,00	99,39%
	PBD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	11.304.809.000,00	9.711.049.078,00	85,90%
6928	Penyelenggaraan Pengkajian Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila		15.965.209.000,00	12.113.687.632,00	75,88%
	ABN	Kebijakan Bidang Sosial	3.531.917.000,00	3.517.745.301,00	99,60%
	PBC	Kebijakan Bidang Politik	4.808.319.000,00	4.802.616.105,00	99,88%
	PBH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	7.624.973.000,00	3.793.326.226,00	49,75%
6929	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila		52.056.965.000,00	49.386.521.980,00	94,87%
	AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1.202.304.000,00	1.098.039.597,00	91,33%
	BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	35.056.595.000,00	33.142.748.262,00	94,54%
	PDE	Akreditasi Lembaga	1.995.935.000,00	1.971.342.088,00	98,77%
	PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	4.736.097.000,00	4.475.517.995,00	94,50%
	SCJ	Pelatihan Bidang Sosial	9.066.034.000,00	8.698.874.038,00	95,95%
6930	Pengendalian dan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila		11.145.467.000,00	10.114.094.298,00	90,75%
	ABC	Kebijakan Bidang Politik	5.203.802.000,00	5.137.041.891,00	98,72%
	PBC	Kebijakan Bidang Politik	2.817.839.000,00	2.336.560.280,00	82,92%
	PBN	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	3.123.826.000,00	2.640.492.127,00	84,53%
Program Dukungan Manajemen			195.475.227.000,00	181.110.956.998,00	92,65%
6925	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen		195.475.227.000,00	181.110.956.998,00	92,65%
	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	177.702.025.000,00	164.377.460.946,00	92,50%
	EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3.768.000.000,00	3.037.064.340,00	80,60%
	EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	3.692.855.000,00	3.587.670.430,00	97,15%
	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	10.312.347.000,00	10.108.761.282,00	98,03%
Total Anggaran			374.428.347.000,00	342.063.934.273,00	91,36%
Pengembalian Belanja			0,00	(5.607.428.035,00)	0,00%
Grand Total			374.428.347.000,00	336.456.506.238,00	89,86%

Tabel 11. Rincian Belanja berdasarkan Program dan Kegiatan per 31 Desember 2025.



Perbandingan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK/TURUN (%)
Belanja Pegawai	85.877.421.730,00	81.795.687.985,00	4,99
Belanja Barang	253.149.448.203,00	231.940.046.451,00	9,14
Belanja Modal	3.037.064.340,00	6.875.807.418,00	(55,83)
Jumlah Belanja	342.063.934.273,00	320.611.541.854,00	6,69
Pengembalian Belanja	(5.607.428.035,00)	(6.423.972.018,00)	(12,71)
Jumlah Belanja Netto	336.456.506.238,00	314.187.569.836,00	7,09

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025 dan 2024.

Realisasi Belanja per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 7,09 persen dibandingkan pada per 31 Desember 2024. Kenaikan Belanja Pegawai sebesar 4,99% atau sebesar Rp4.081.733.745,00 dikarenakan terdapat penambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kenaikan pangkat, dan kenaikan gaji secara berkala. Kenaikan Belanja Barang sebesar 9,14% atau sebesar Rp21.209.401.752,00 karena terdapat Kegiatan Partisipasi Bermakna Rancangan Undang-undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) dan Kegiatan Sosialisasi Pancasila bersama Anggota DPR RI, sedangkan Belanja Modal mengalami penurunan sebesar 55,83% atau sebesar Rp3.838.743.078,00 dikarenakan kebutuhan terhadap belanja modal sudah tercukupi.



Belanja Pegawai

Rp85.843.392.450,00

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai (neto) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp85.843.392.450,00 dan Rp81.778.562.690,00 atau terjadi kenaikan sebesar 4,97 persen dari periode TA yang lalu.

Belanja Tunjangan Kinerja Pegawai bulan Desember TA 2025 dibayarkan penuh, namun jika terdapat penyesuaian absensi pegawai maka dilaksanakan pemotongan tunjangan dan pengembalian ke kas negara yang dilakukan pada TA 2026 dan dicatat pada Laporan Keuangan Semester I TA 2026.

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025

URAIAN	2025		
	Anggaran	Realisasi	Real Angg. (%)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	22.398.842.000,00	21.805.864.309,00	97,35
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	3.215.717.000,00	3.086.102.363,00	95,97
Belanja Lembur	176.613.000,00	60.300.000,00	34,14
Belanja Tunjangan Khusus	62.180.948.000,00	60.925.155.058,00	97,98
Jumlah Belanja	87.972.120.000,00	85.877.421.730,00	97,62
Pengembalian Belanja	0,00	(34.029.280,00)	0,00
Jumlah Belanja Netto	87.972.120.000,00	85.843.392.450,00	97,58

Tabel 13. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai per 31 Desember 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI		NAIK (TURUN) %
	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	21.805.864.309,00	20.452.103.806,00	6,62
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	3.086.102.363,00	1.289.265.498,00	139,37
Belanja Lembur	60.300.000,00	113.259.000,00	(46,76)
Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	60.925.155.058,00	59.941.059.681,00	1,64
Jumlah Belanja	85.877.421.730,00	81.795.687.985,00	4,99
Pengembalian Belanja Pegawai	(34.029.280,00)	(17.125.295,00)	98,71
Jumlah Belanja Netto	85.843.392.450,00	81.778.562.690,00	4,97

Tabel 14. Realisasi dan Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024.



B.3.1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS (neto) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp21.790.521.729,00 atau 97,28 persen dari anggaran sebesar Rp22.398.842.000,00.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	(Rp)	(%)
Belanja Gaji Pokok PNS	15,201,207,160.00	14,486,808,200.00	714,398,960.00	4.93
Belanja Pembulatan Gaji PNS	201,633.00	213,068.00	(11,435.00)	(5.37)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	945,075,198.00	934,239,790.00	10,835,408.00	1.16
Belanja Tunj. Anak PNS	243,650,261.00	237,353,510.00	6,296,751.00	2.65
Belanja Tunj. Struktural PNS	1,681,090,000.00	1,705,820,000.00	(24,730,000.00)	(1.45)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	972,712,000.00	732,400,000.00	240,312,000.00	32.81
Belanja Tunj. PPh PNS	213,939,037.00	207,814,518.00	6,124,519.00	2.95
Belanja Tunj. Beras PNS	740,929,020.00	707,253,720.00	33,675,300.00	4.76
Belanja Uang Makan PNS	1,485,290,000.00	1,078,791,000.00	406,499,000.00	37.68
Belanja Tunj. Umum PNS	321,770,000.00	361,410,000.00	(39,640,000.00)	(10.97)
Jumlah Belanja Pegawai	21,805,864,309.00	20,452,103,806.00	1,353,760,503.00	6.62
Pengembalian belanja pegawai	(15,342,580.00)	(8,394,828.00)	(6,947,752.00)	82.76
Jumlah Belanja Pegawai Netto	21,790,521,729.00	20,443,708,978.00	1,346,812,751.00	6.59

Tabel 15. Realisasi dan Perbandingan Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per 31 Desember 2025 dan 2024.

Belanja Gaji dan Tunjangan per 31 Desember 2025 sebesar Rp21.790.521.729,00 sedangkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.443.708.978,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp1.346.812.751,00 atau 6,59 persen. Kenaikan Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dikarenakan terdapat penambahan pejabat BPIP yang baru dilantik, penambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), kenaikan pangkat, dan kenaikan gaji secara berkala.



B.3.2 Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK (neto) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.081.997.663,00 atau 95,84 persen dari anggaran sebesar Rp3.215.717.000,00.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	(Rp)	(%)
Belanja Gaji Pokok PPPK	2,272,549,400.00	961,080,000.00	1,311,469,400.00	136.46
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	26,615.00	6,714.00	19,901.00	296.41
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	106,161,860.00	39,083,920.00	67,077,940.00	171.63
Belanja Tunjangan Anak PPPK	29,314,148.00	11,020,384.00	18,293,764.00	166.00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	257,765,000.00	160,872,000.00	96,893,000.00	60.23
Belanja Tunjangan Beras PPPK	110,585,340.00	43,017,480.00	67,567,860.00	157.07
Belanja Uang Makan PPPK	265,130,000.00	74,185,000.00	190,945,000.00	257.39
Belanja Tunjangan Umum PPPK	44,570,000.00	0.00	44,570,000.00	0.00
Jumlah Belanja Pegawai	3,086,102,363.00	1,289,265,498.00	1,796,836,865.00	139.37
Pengembalian belanja pegawai	(4,104,700.00)	0.00	(4,104,700.00)	0.00
Jumlah Belanja Pegawai Netto	3,081,997,663.00	1,289,265,498.00	1,792,732,165.00	139.05

Tabel 16. Realisasi dan Perbandingan Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK per 31 Desember 2025 dan 2024.

Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.086.102.363,00, sedangkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.289.265.498,00. Terdapat peningkatan sebesar Rp1.796.836.865,00 dari TA sebelumnya dikarenakan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

B.3.3 Belanja Lembur

Realisasi Belanja Lembur (neto) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp60.300.000,00 atau 34,14 persen dari anggaran sebesar Rp176.613.000,00.



Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	(Rp)	(%)
Belanja Uang Lembur	42,375,000.00	112,109,000.00	(69,734,000.00)	(62.20)
Belanja Uang Lembur PPPK	17,925,000.00	1,150,000.00	16,775,000.00	1,458.70
Jumlah Belanja Pegawai	60,300,000.00	112,109,000.00	(51,809,000.00)	(46.21)
Pengembalian belanja pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja Pegawai Netto	60,300,000.00	112,109,000.00	(51,809,000.00)	(46.21)

Tabel 17. Realisasi dan Perbandingan Belanja Lembur per 31 Desember 2025 dan 2024.

Belanja Lembur per 31 Desember 2025 sebesar Rp60.300.000,00 sedangkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp112.109.000,00. Terdapat penurunan sebesar Rp51.809.000,00 atau 46,21 persen dari TA sebelumnya dikarenakan pengajuan lembur yang dilakukan unit kerja menurun.

B.3.4 Belanja Tunjangan Khusus

Realisasi Belanja Tunjangan Khusus (neto) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp60.910.573.058,00 atau 97,96 persen dari anggaran sebesar Rp62.180.948.000,00.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	(Rp)	(%)
Belanja Tunjangan Khusus	56,655,509,059.00	58,182,610,628.00	(1,527,101,569.00)	(2.62)
Belanja Tunjangan Khusus PPPK	4,269,645,999.00	1,758,449,053.00	2,511,196,946.00	142.81
Jumlah Belanja Pegawai	60,925,155,058.00	59,941,059,681.00	984,095,377.00	1.64
Pengembalian belanja pegawai	(14,582,000.00)	(8,730,467.00)	(5,851,533.00)	67.02
Jumlah Belanja Pegawai Netto	60,910,573,058.00	59,932,329,214.00	978,243,844.00	1.63

Tabel 18. Realisasi dan Perbandingan Belanja Tunjangan Khusus per 31 Desember 2025 dan 2024.

Belanja Tunjangan Khusus per 31 Desember 2025 sebesar Rp60.910.573.058,00 sedangkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp59.932.329.214, Terdapat kenaikan sebesar Rp978.243.844,00 atau 1,63 persen. Kenaikan Belanja Tunjangan Khusus dikarenakan terdapat penambahan Belanja Tunjangan Khusus PPPK



serta penambahan pejabat BPIP yang baru dilantik dan kebijakan pemberian THR dan Gaji ke-13 yang berlaku di tahun 2025.

Belanja Barang**Rp247.576.049.448,00****B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang (netto) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp247.576.049.448,00 dan Rp225.533.199.728,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp22.042.849.720,00 atau 9,77 persen dari realisasi belanja barang periode pelaporan yang sama pada TA 2024.

Realisasi Anggaran Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025

Uraian	PER 31 DESEMBER 2025		
	Anggaran	Realisasi	Real Angg. (%)
Belanja Barang Operasional	14,053,457,000.00	13,539,329,129.00	96.34
Belanja Barang Non Operasional	16,539,647,000.00	14,010,972,605.00	84.71
Belanja Barang Persediaan	5,488,436,000.00	4,046,682,423.00	73.73
Belanja Jasa	114,392,480,000.00	95,576,942,714.00	83.55
Belanja Pemeliharaan	5,442,855,000.00	4,998,516,985.00	91.84
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	126,248,895,000.00	120,454,578,245.00	95.41
Belanja Perjalanan Luar Negeri	522,457,000.00	522,426,102.00	99.99
Jumlah Belanja Barang	282,688,227,000.00	253,149,448,203.00	89.55
Pengembalian Belanja	0.00	(5,573,398,755.00)	0.00
Jumlah Belanja Barang Netto	282,688,227,000.00	247,576,049,448.00	87.58

Tabel 19. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025.

Peningkatan realisasi dikarenakan dengan bertambahnya jumlah pegawai BPIP (CPNS dan PPPK) sehingga meningkatkan kebutuhan alat tulis kantor, disamping itu juga bertambahnya belanja perjalanan dinas dalam negeri dalam rangka Kegiatan Relawan Kebajikan dan Partisipasi Bermakna RUU BPIP serta belanja jasa lainnya seperti Event Organizer.



Perbandingan Realisasi Belanja Barang untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	(Rp)	(%)
Belanja Barang Operasional	13,539,329,129.00	16,941,287,182.00	(3,401,958,053.00)	(20.08)
Belanja Barang Non Operasional	14,010,972,605.00	14,021,328,745.00	(10,356,140.00)	(0.07)
Belanja Barang Persediaan	4,046,682,423.00	3,116,063,325.00	930,619,098.00	29.87
Belanja Jasa	95,576,942,714.00	72,917,966,439.00	22,658,976,275.00	31.07
Belanja Pemeliharaan	4,998,516,985.00	4,954,169,919.00	44,347,066.00	0.90
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	120,454,578,245.00	119,324,404,415.00	1,130,173,830.00	0.95
Belanja Perjalanan Luar Negeri	522,426,102.00	664,826,426.00	(142,400,324.00)	(21.42)
Jumlah Belanja Barang	253,149,448,203.00	231,940,046,451.00	21,209,401,752.00	9.14
Pengembalian belanja Barang	(5,573,398,755.00)	(6,406,846,723.00)	833,447,968.00	(13.01)
Jumlah Belanja Barang Netto	247,576,049,448.00	225,533,199,728.00	22,042,849,720.00	9.77

Tabel 20. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 2024.

B.4.1 Belanja Barang Operasional

Realisasi Belanja Barang Operasional (neto) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp13.523.394.029, atau 96,23 persen dari anggaran sebesar Rp14.053.457.000,00.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	(Rp)	(%)
Belanja Keperluan Perkantoran	7,384,635,348.00	14,691,644,413.00	(7,307,009,065.00)	(49.74)
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	19,593,265.00	52,418,500.00	(32,825,235.00)	(62.62)
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	639,876,000.00	482,928,000.00	156,948,000.00	32.50
Belanja Barang Operasional Lainnya	5,495,224,516.00	1,714,296,269.00	3,780,928,247.00	220.55
Jumlah Belanja Barang Operasional	13,539,329,129.00	16,941,287,182.00	(3,401,958,053.00)	(20.08)
Pengembalian belanja Barang Operasional	(15,935,100.00)	(52,492,034.00)	36,556,934.00	(69.64)
Jumlah Belanja Barang Operasional Netto	13,523,394,029.00	16,888,795,148.00	(3,365,401,119.00)	(19.93)

Tabel 21. Realisasi Belanja Barang Operasional per 31 Desember 2025 dan 2024.

Terdapat penurunan sebesar Rp3.365.401.119,00 atau 19,93 persen dari periode pelaporan yang sama pada tahun 2024. Penurunan Realisasi Belanja Barang Operasional per 31 Desember 2025 dikarenakan



penurunan belanja Keperluan Perkantoran dan penurunan belanja pengiriman surat dinas pos pusat.

B.4.2 Belanja Barang Non Operasional

Realisasi Belanja Barang Non Operasional (neto) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp14.010.972.605,00 atau 84,71 persen dari anggaran sebesar Rp16.539.647.000,00.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	(Rp)	(%)
Belanja Bahan	10,275,071,605.00	12,200,264,366.00	(1,925,192,761.00)	(15.78)
Belanja Honor Output Kegiatan	1,166,300,000.00	973,590,000.00	192,710,000.00	19.79
Belanja Non Operasional Lainnya	2,569,601,000.00	773,280,479.00	1,796,320,521.00	232.30
Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk barang	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Perlatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0.00	74,193,900.00	(74,193,900.00)	(100.00)
Jumlah Belanja Barang Non Operasional	14,010,972,605.00	14,021,328,745.00	(10,356,140.00)	(0.07)
Pengembalian Belanja Barang	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja Barang Non Operasional Netto	14,010,972,605.00	14,021,328,745.00	(10,356,140.00)	(0.07)

Tabel 22. Realisasi Belanja Barang Non Operasional per 31 Desember 2025 dan 2024.

Terdapat penurunan Realisasi Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp10.356.140,00 atau 0,07 persen dibandingkan periode pelaporan yang sama pada tahun 2024. Penurunan Belanja Barang Non Operasional per 31 Desember 2025 dikarenakan adanya perubahan presentase pada SBM tahun 2025 serta pembatasan pemberian honor pada pegawai.

B.4.3 Belanja Barang Persediaan

Realisasi Belanja Barang Persediaan (neto) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.046.682.423,00 atau 73,73 persen dari anggaran sebesar Rp5.488.436.000,00.



Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	(Rp)	(%)
Belanja Barang Persediaan Konsumsi	4.046.682.423,00	3.116.063.325,00	930.619.098,00	29,87
Jumlah Belanja Barang Persediaan	4.046.682.423,00	3.116.063.325,00	930.619.098,00	29,87
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Barang Persediaan Netto	4.046.682.423,00	3.116.063.325,00	930.619.098,00	29,87

Tabel 23. Realisasi Belanja Barang Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024.

Terdapat kenaikan Realisasi Belanja Barang Persediaan sebesar Rp930.619.098,00 atau 29,87 persen dibanding periode pelaporan yang sama pada tahun 2024. Kenaikan Belanja Persediaan per 31 Desember 2025 dikarenakan bertambahnya alokasi anggaran belanja barang persediaan konsumsi pada tahun 2025, serta bertambahnya kebutuhan barang persediaan dikarenakan bertambahnya jumlah pegawai BPIP.

B.4.4 Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa (neto) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp95.463.187.714,00 atau 83,45 persen dari anggaran sebesar Rp114.392.480.000,00.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	(Rp)	(%)
Belanja Jasa Konsultan	152.833.000,00	274.822.000,00	(121.989.000,00)	(44,39)
Belanja Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Langganan Telepon	2.249.185,00	2.174.314,00	74.871,00	3,44
Belanja Langganan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa	5.876.981.200,00	6.212.419.000,00	(335.437.800,00)	(5,40)
Belanja Jasa Profesi	8.279.900.000,00	8.144.005.000,00	135.895.000,00	1,67
Belanja Jasa Lainnya	81.264.979.329,00	58.284.546.125,00	22.980.433.204,00	39,43
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Jasa	95.576.942.714,00	72.917.966.439,00	22.658.976.275,00	31,07
Pengembalian belanja Barang Jasa	(113.755.000,00)	(28.982.024,00)	(84.772.976,00)	292,50
Jumlah Belanja Jasa Netto	95.463.187.714,00	72.888.984.415,00	22.574.203.299,00	30,97

Tabel 24. Realisasi Belanja Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024.



Terdapat kenaikan sebesar Rp22.516.239.251,00 atau 30,89 persen dari periode pelaporan yang sama pada TA 2024. Kenaikan Belanja Jasa per 31 Desember 2025 meningkat pada akun Belanja Jasa Lainnya dikarenakan terdapat pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Relawan Kebajikan dan Kegiatan Partisipasi Bermakna RUU BPIP.

B.4.5 Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan (neto) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.998.516.985,00 atau 91,84 persen dari anggaran sebesar Rp5.442.855.000,00.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	(Rp)	(%)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0.00	34,842,692.00	(34,842,692.00)	(100.00)
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	238,247,500.00	94,200,600.00	144,046,900.00	152.92
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	283,688,651.00	37,241,422.00	246,447,229.00	661.76
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4,000,569,364.00	4,174,129,325.00	(173,559,961.00)	(4.16)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28,975,500.00	0.00	28,975,500.00	0.00
Belanja Pemeliharaan Lainnya	447,035,970.00	613,755,880.00	(166,719,910.00)	(27.16)
Jumlah Belanja Barang Bruto	4,998,516,985.00	4,954,169,919.00	44,347,066.00	0.90
Pengembalian belanja Barang Pemeliharaan	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja Barang Netto	4,998,516,985.00	4,954,169,919.00	44,347,066.00	0.90

Tabel 25. Realisasi Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 2024.

Terdapat kenaikan sebesar Rp44.347.066,00 atau 0,90 persen dibandingkan periode pelaporan yang sama pada TA 2024. Kenaikan Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dikarenakan meningkatnya jumlah aset yang membutuhkan pemeliharaan.



B.4.6 Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri (neto) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp115.010.869.590,00 atau 91,10 persen dari anggaran sebesar Rp126.248.895.000,00.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	(Rp)	(%)
Belanja Perjalanan Biasa	16,736,539,442.00	25,883,175,408.00	(9,146,635,966.00)	(35.34)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,056,300,996.00	519,334,500.00	1,536,966,496.00	295.95
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	44,619,917,860.00	42,555,413,254.00	2,064,504,606.00	4.85
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	57,041,819,947.00	50,366,481,253.00	6,675,338,694.00	13.25
Jumlah Belanja Barang Bruto	120,454,578,245.00	119,324,404,415.00	1,130,173,830.00	0.95
Pengembalian Belanja Barang	(5,443,708,655.00)	(6,287,587,755.00)	843,879,100.00	(13.42)
Jumlah Belanja Barang Netto	115,010,869,590.00	113,036,816,660.00	1,974,052,930.00	1.75

Tabel 26. Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri per 31 Desember 2025 dan 2024.

Terdapat kenaikan sebesar Rp1.974.052.930,00 atau 1,75 persen dibandingkan periode pelaporan yang sama pada TA 2024. Kenaikan Belanja Perjalanan Dalam Negeri per 31 Desember 2025 dikarenakan kenaikan belanja perjalanan dinas dalam kota dan belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota di tahun 2025 seperti pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Relawan Kebajikan dan Kegiatan Partisipasi Bermakna RUU BPIP.

B.4.7 Belanja Perjalanan Luar Negeri

Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri (neto) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp522.426.102,00 atau 99,99 persen dari anggaran sebesar Rp522.457.000,00.



Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	(Rp)	(%)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Biasa	522,426,102.00	664,826,426.00	(142,400,324.00)	(21.42)
Jumlah Belanja Barang Bruto	522,426,102.00	664,826,426.00	(142,400,324.00)	(21.42)
Pengembalian belanja Barang	0.00	(37,784,910.00)	37,784,910.00	(100.00)
Jumlah Belanja Barang Netto	522,426,102.00	627,041,516.00	(104,615,414.00)	(16.68)

Tabel 27. Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri per 31 Desember 2025 dan 2024.

Terdapat penurunan sebesar Rp104.615.414,00 atau 16,68 persen dibandingkan periode pelaporan yang sama pada TA 2024. Penurunan realisasi belanja perjalanan dinas luar negeri pada periode pelaporan TA 2025 dikarenakan berkurangnya undangan ceramah tentang nilai-nilai Pancasila di luar negeri serta penurunan alokasi anggaran belanja perjalanan luar negeri pada tahun anggaran 2025.

Belanja Modal
Rp3.037.064.340,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal (neto) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.037.064.340,00 dan Rp6.875.807.418,00 atau terjadi penurunan sebesar 55,83 persen dari periode TA yang lalu. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Anggaran Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025

URAIAN	Anggaran	Realisasi	Real Angg. (%)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.882.000.000,00	2.864.604.288,00	99,40
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	120.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	766.000.000,00	172.460.052,00	22,51
Jumlah Belanja Modal Kotor	3.768.000.000,00	3.037.064.340,00	80,60
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	3.768.000.000,00	3.037.064.340,00	80,60

Tabel 28. Realisasi Anggaran Belanja Modal per 31 Desember 2025.



Perbandingan Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	(Rp)	(%)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.864.604.288,00	5.432.231.618,00	(2.567.627.330,00)	(47,27)
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0,00	52.837.600,00	(52.837.600,00)	(100,00)
Belanja Modal Lainnya	172.460.052,00	1.199.152.200,00	(1.026.692.148,00)	(85,62)
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	0,00	191.586.000,00	(191.586.000,00)	(100,00)
Jumlah Belanja Modal Bruto	3.037.064.340,00	6.875.807.418,00	(3.838.743.078,00)	(55,83)
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal Netto	3.037.064.340,00	6.875.807.418,00	(3.838.743.078,00)	(55,83)

Tabel 29. Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 2024.

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.838.743.078,00 atau 55,83 persen dibandingkan periode pelaporan yang sama pada TA 2025. Hal ini disebabkan karena kebutuhan akan belanja modal sudah tercukupi.

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.864.604.288,00 dan Rp5.485.069.218,00. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dalam rangka mendukung rencana strategis antara lain penambahan sarana dan prasarana untuk operasional serta peningkatan kinerja.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	(Rp)	(%)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.864.604.288,00	5.432.231.618,00	(2.567.627.330,00)	(47,27)
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0,00	52.837.600,00	(52.837.600,00)	(100,00)
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.864.604.288,00	5.485.069.218,00	(2.620.464.930,00)	(47,77)
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Netto	2.864.604.288,00	5.485.069.218,00	(2.620.464.930,00)	(47,77)

Tabel 30. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024.



Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin per 31 Desember 2025 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp2.864.604.288,00 atau 47,77 persen dibandingkan realisasi per 31 Desember 2024, hal ini disebabkan karena kebutuhan akan belanja modal sudah tercukupi, serta penurunan alokasi anggaran Belanja Modal dan Mesin pada tahun anggaran 2025.

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2025	(%)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal Netto	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabel 31. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024.

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan disebabkan belum adanya rencana pembangunan gedung secara mandiri oleh BPIP.

B.5.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan per 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025



tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan belum terdapat Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan di semua lingkup BPIP dalam rangka mendukung rencana strategis.

B.5.4 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp172.460.052,00 dan Rp1.390.738.200,00. Belanja Modal Lainnya merupakan pengadaan Jasa Konsultan di lingkungan BPIP dan peningkatan fungsi dan manfaat atas Gedung dan Bangunan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	(Rp)	(%)
Belanja Modal Lainnya	172,460,052.00	1,199,152,200.00	(1,026,692,148.00)	(85.62)
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	0.00	191,586,000.00	(191,586,000.00)	(100.00)
Jumlah Belanja Modal Lainnya	172,460,052.00	1,390,738,200.00	(1,218,278,148.00)	(87.60)
Pengembalian Belanja Modal	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja Modal Netto	172,460,052.00	1,390,738,200.00	(1,218,278,148.00)	(87.60)

Tabel 32. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2025 berupa jasa konsultasi. Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.218.278.148,00 atau 87,60 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2024 hal ini disebabkan karena kebutuhan akan Belanja Gedung dan Bangunan dalam Renovasi menurun.



C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

**Kas di Bendahara
Pengeluaran**
Rp0,00

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada BPIP per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2025 dan 2024*

Keterangan	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran (UP)	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran (TUP)	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Tabel 33. Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024.

**Kas Lainnya dan
Setara Kas**
Rp0,00

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:



Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024

Keterangan	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
LS Bendahara	0,00	0,00
Lain-lain (retur transfer)	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Tabel 34. Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024.

Tidak adanya transaksi pada Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp0,00 sehingga semua transaksi TA 2025 sudah dilakukan pendistribusian kepada pihak ketiga.

Piutang Bukan Pajak
Rp72.866.052,00

C.3 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp72.866.052,00 dan Rp445.647.063,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian piutang bukan pajak sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024

Keterangan	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
Piutang PNBPN	0,00	0,00
Piutang Lainnya	72.866.052,00	445.647.063,00
Jumlah	72.866.052,00	445.647.063,00

Tabel 35. Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024.

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp72.866.052,00 berupa kekurangan volume atas Pekerjaan Revitalisasi Ruang Kerja/Kantor BPIP oleh CV CIA. Rincian mengenai Piutang Bukan Pajak terlampir pada Pengungkapan Lain-Lain F.1.b



Nilai Ketuhanan



Nilai Kemanusiaan



Nilai Persatuan



Nilai Permasyarakatan



Nilai Keadilan Sosial

**Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Bukan Pajak
(Rp72.866.052,00)**

C.4 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar minus Rp72.866.052,00 dan minus Rp123.977.985,00. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih berdasarkan kategori piutang disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024

Keterangan	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(72.866.052,00)	(123.977.985,00)
Jumlah	(72.866.052,00)	(123.977.985,00)

Tabel 36. Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 berasal dari penyisihan atas piutang lainnya yaitu piutang CV CIA dengan kualitas piutang macet.

**Belanja Dibayar di
Muka
Rp40.828.328,00**

C.5 Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp40.828.328,00 dan Rp20.385.078,00 dengan rincian sebagai berikut:



*Perbandingan Rincian Belanja Dibayar di Muka
per 31 Desember 2025 dan 2024*

Keterangan	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
Pembayaran <i>Renewal Lisensi</i>	40.828.328,00	20.385.078,00
Jumlah	40.828.328,00	20.385.078,00

Tabel 37. Perbandingan Rincian Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Terdapat kenaikan nilai belanja dibayar di muka tahun 2025 sebesar Rp20.443.250,00. Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2025 berasal dari pembelian perpanjangan masa guna lisensi yang penggunaannya melebihi tahun anggaran 2025, sehingga perlu dilakukan pengakuan atas sisa belanja. Belanja Dibayar di Muka terdiri dari pembelian perpanjangan masa guna lisensi adobe, freepik, canva, lisensi anti-spam & anti-virus, lisensi zoom & zoom workplace, serta paket data seluler pelacak kendaraan dengan rincian terlampir pada lampiran VI.d.

Persediaan

Rp2.148.891.874,00

C.6 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2.148.891.874,00 dan Rp2.010.388.192,00 dengan rincian sebagai berikut:



*Perbandingan Rincian Persediaan per 31 Desember
2025 dan 2024*

Keterangan	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
Barang Konsumsi	2.148.891.874,00	2.010.388.192,00
Jumlah	2.148.891.874,00	2.010.388.192,00

Tabel 38. Perbandingan Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024.

Persediaan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp138.503.682,00. Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Rincian barang persediaan disajikan pada lampiran VI.c. Persediaan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp138.503.682,00. Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik dan telah dilakukan stok opname per 31 Desember 2025. Rincian barang persediaan disajikan pada lampiran VI.c.

TanahTanah
Rp0,00

C.7 Tanah

Tanah yang dimiliki BPIP per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut.

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	0,00
Mutasi tambah:	0,00
Pembelian	0,00
Hibah	0,00
Reklasifikasi	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Revaluasi aset	0,00
Saldo 31 Desember 2025	0,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	0,00
Nilai Buku 31 Desember 2025	0,00

Tabel 39. Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024.



Nilai Ketuhanan



Nilai Kemusiaan



Nilai Persatuan



Nilai Permasyarakatan



Nilai Keadilan Sosial

Peralatan dan Mesin
Rp81.060.842.622,00

C.8 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp81.060.842.622,00 dan Rp80.250.490.174,00. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	80.250.490.174,00
Mutasi tambah:	2.986.992.048,00
Pembelian	2.864.604.288,00
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	122.387.760,00
Mutasi kurang:	(2.176.639.600,00)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	(1.861.104.100,00)
Penghapusan	(315.535.500,00)
Saldo 31 Desember 2025	81.060.842.622,00
<i>Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025</i>	<i>(62.836.889.139,00)</i>
Nilai Buku 31 Desember 2025	18.223.953.483,00

Tabel 40. Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025.

Mutasi tambah senilai Rp2.986.992.048,00 dan Mutasi kurang senilai minus Rp2.176.639.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Mutasi tambah senilai Rp2.864.604.288,00 berasal dari Pembelian Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:



NO	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
1	Pompa Air	1	1,287,500.00
2	White Board	2	3,020,000.00
3	A.C. Split	7	41,826,998.00
4	Dispenser	5	12,627,499.00
5	Audio Amplifier	1	15,101,550.00
6	Voice Recorder	2	3,529,500.00
7	Peralatan Studio Audio Lainnya	1	25,951,800.00
8	Tripod Camera	2	8,553,998.00
9	Camera Conference	4	155,538,752.00
10	Video Wall	1	87,800,000.00
11	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	6	9,766,328.00
12	Tablet PC	10	205,000,350.00
13	Laptop	30	966,000,013.00
14	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	2	1,328,600,000.00
JUMLAH		74	2,864,604,288.00

Tabel 41. Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin.

Pembelian Peralatan dan Mesin diantaranya Alat Bantu (Pompa Air), Alat Angkutan Darat Bermotor (Hiace), Alat Kantor (White Board Paskibra), Komputer Unit (Laptop), Alat Studio (kamera, tripod, keyboard, ampli, dan voice recorder), Alat Rumah Tangga (dispenser)

- Mutasi tambah senilai Rp122.387.760,00 berasal dari Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif berupa 3 buah Laptop dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
1	Laptop	3	122.387.760,00
JUMLAH		3	122.387.760,00

Tabel 42. Rincian Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif

- Mutasi kurang senilai Rp315.535.500,00 berasal dari penghapusan Peralatan dan Mesin yang sudah tidak digunakan dengan rincian sebagai berikut:



NO	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
1	Lambang Garuda Pancasila	5	11.000.000,00
2	Facsimile	2	3.480.000,00
3	Microwave Oven	2	3.718.000,00
4	LapTop	15	297.337.500,00
JUMLAH		24	315.535.500,00

Tabel 43. Rincian Penghapusan Peralatan dan Mesin.

- Mutasi kurang senilai Rp1.861.104.100,00 berasal dari penghentian aset dari penggunaan peralatan dan mesin dikarenakan rusak berat serta henti guna dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
1	Alat Penghancur Kertas	10	36.180.000,00
2	Mesin Absensi	1	176.000.000,00
3	Kursi Besi/Metal	24	34.899.000,00
4	Kasur/Spring Bed	2	44.979.000,00
5	Sofa	2	13.839.700,00
6	A.C. Split	3	17.805.000,00
7	Alat Dapur Lainnya	1	1.115.000,00
8	Televisi	2	8.766.900,00
9	Dispenser	2	8.495.000,00
10	Coffee Maker	3	5.175.000,00
11	Microwave Oven	1	1.859.000,00
12	P.C. Unit	61	750.946.500,00
13	Lap Top	22	303.225.000,00
14	Tablet PC	7	102.799.000,00
15	Printer	53	313.440.000,00
16	Scanner	5	41.580.000,00
JUMLAH		199	1.861.104.100,00

Tabel 44. Rincian Penghentian Aset Dari Penggunaan Peralatan dan Mesin.

**Gedung dan
Bangunan
Rp0,00**

C.9 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:



Saldo 31 Desember 2024	0,00
Mutasi tambah:	0,00
Pembangunan Gedung	0,00
Koreksi pencatatan	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Koreksi pencatatan	0,00
Saldo 31 Desember 2025	0,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	0,00
Nilai Buku 31 Desember 2025	0,00

Tabel 45. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025

Gedung yang ditempati BPIP tidak termasuk dalam kepemilikan sendiri. Gedung tersebut merupakan milik Kementerian Sekretariat Negara yang direnovasi secara mandiri oleh BPIP.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp0,00

C.10 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo 31 Desember 2024	0,00
Mutasi tambah:	0,00
Pengembangan Jaringan	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Koreksi Pencatatan	0,00
Saldo 31 Desember 2025	0,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	0,00
Nilai Buku 31 Desember 2025	0,00

Tabel 46. Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025.



Aset Tetap Lainnya
Rp172.460.052,00

C.11 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp172.460.052,00 dan Rp1.105.801.200,00.

Saldo 31 Desember 2024	1,105,801,200.00
Mutasi tambah:	172,460,052.00
Pembelian	172,460,052.00
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0.00
Mutasi kurang:	(1,105,801,200.00)
Transfer Keluar	(1,032,935,148.00)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(72,866,052.00)
Saldo 31 Desember 2025	172,460,052.00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	0.00
Nilai Buku 31 Desember 2025	172,460,052.00

Tabel 47. Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025.

Aset Tetap lainnya berasal dari Aset Tetap Renovasi atas Gedung dan Bangunan yang berasal dari penggunaan sementara barang milik negara pada Kementerian Sekretariat Negara oleh BPIP. Mutasi tambah berasal dari Pengerjaan Pengecatan Gedung BPIP sebesar Rp172.460.052,00 dan Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp0,00.

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp0,00

C.12 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan tempat kerja dan tempat tinggal yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Adapun mutasi



Konstruksi Dalam Pengerjaan pada BPIP adalah sebagai berikut:

Saldo 31 Desember 2024	0,00
Mutasi tambah:	0,00
Perolehan	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Penyelesaian Pembangunan	0,00
Koreksi pencatatan	0,00
Saldo 31 Desember 2025	0,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	0,00
Nilai Buku 31 Desember 2025	0,00

Tabel 48. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025.

**Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap**
Rp62.836.889.139,00

C.13 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp62.836.889.139,00 dan Rp53.115.750.092,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2025

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	81.060.842.622,00	(62.836.889.139,00)	143.897.731.761,00
2	Aset Tetap Lainnya	172.460.052,00	0,00	172.460.052,00
	Akumulasi Penyusutan	81.233.302.674,00	(62.836.889.139,00)	144.070.191.813,00

Tabel 49. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

Rincian akumulasi penyusutan Aset Tetap disajikan pada lampiran VI.a. Rincian akumulasi penyusutan Aset Tetap disajikan pada lampiran VI.a.



C.14 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
Rp4.570.810.725,00

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp4.570.810.725,00 dan Rp4.570.810.725,00 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Nilai
1	Software	1.951.126.700,00
2	Lisensi	1.411.716.525,00
3	Aset Tak Berwujud Lainnya	1.207.967.500,00
Nilai Perolehan per 31 Desember 2024		4.570.810.725,00

Tabel 50. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan atas aset tak berwujud hingga 31 Desember 2025. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan atas aset tak berwujud hingga 31 Desember 2025.

Saldo 31 Desember 2024	4.570.810.725,00
Mutasi tambah:	0,00
Pembelian	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Transfer Keluar	0,00
Saldo 31 Desember 2025	4.570.810.725,00
Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	(2.359.434.656,00)
Nilai Buku 31 Desember 2025	2.211.376.069,00

Tabel 51. Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025.

**Dana Yang Dibatasi Penggunaannya**
Rp1.758.980.382,00

C.15 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp1.758.980.382,00 dan Rp597.565.704,00. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan Dana di Rekening Penampungan Kementerian/Lembaga yang digunakan dalam transaksi pelaksanaan anggaran dengan mekanisme Rekening Penampungan Akhir yang menggantikan Bank Garansi Tahun Anggaran (RPATA) adapun transaksinya berupa Pembayaran Pengadaan Jasa Lainnya Pengemudi Kendaraan Operasional dan Pramubakti, Pembayaran Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Administrasi dan *Receptionist*, Pembayaran Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Keamanan, Kebersihan dan *Receptionist* Kantor, serta Pembayaran Pengadaan Langganan Jaringan ISP dengan rincian pada lampiran VI.e.

Aset Lain-Lain
Rp156.477.920,00**C.16 Aset Lain-Lain**

Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp156.477.920,00 dan Rp956.750.180,00. Aset Lain-lain merupakan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan senilai Rp156.477.920,00.

Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025

No	Uraian	Nilai
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	156.477.920,00
Nilai Perolehan per 31 Desember 2025		156.477.920,00
Amortisasi s.d. 31 Desember 2025		(151.897.220,00)
Nilai Buku s.d. 31 Desember 2025		4.580.700,00

Tabel 52. Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025

Seluruh saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 merupakan aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi dalam operasional pemerintahan. Saat ini, aset tersebut sedang dalam proses administrasi menunggu Surat Keputusan (SK) Penghapusan untuk dapat dikeluarkan dari neraca.



**Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya**

Rp2.511.331.876,00

C.17 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.511.331.876,00 dan Rp3.008.385.464,00. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Amortisasi	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software Komputer	1.951.126.700,00	(1.951.126.700,00)	0,00
2	Lisensi	1.411.716.525,00	(408.307.956,00)	1.003.408.569,00
3	Aset Tak Berwujud Lainnya	1.207.967.500,00	0,00	1.207.967.500,00
	Jumlah	4.570.810.725,00	(2.359.434.656,00)	2.211.376.069,00
B	Aset Lain-lain			
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	156.477.920,00	(151.897.220,00)	4.580.700,00
	Jumlah	156.477.920,00	(151.897.220,00)	4.580.700,00
	Total	4.727.288.645,00	(2.511.331.876,00)	2.215.956.769,00

Tabel 53. Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025.

**Uang Muka dari
KPPN**

Rp0,00

C.18 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan dalam rangka operasional kegiatan.

*Perbandingan Uang Muka dari KPPN
per 31 Desember 2025 dan 2024*

Keterangan	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
Uang Persediaan (UP)	0,00	0,00
Tambahan Uang Persediaan (TUP)	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Tabel 54. Perbandingan Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024



**Utang kepada Pihak
Ketiga**
Rp 1.998.180.382,00

C.19 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 1.998.180.382,00 dan Rp597.565.704,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 merupakan transaksi RPATA dan transaksi pelaksanaan anggaran yang tidak dapat disetujui karena telah melewati batas waktu penyampaian SPM.

*Perbandingan Utang Kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2025 dan 2024*

Keterangan	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
Utang kepada pihak ketiga	1.998.180.382,00	597.565.704,00
Jumlah	1.998.180.382,00	597.565.704,00

Tabel 55. Perbandingan Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024

Kenaikan Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp1.400.614.678,00 dikarenakan terdapat transaksi pelaksanaan anggaran yang tidak dapat disetujui karena telah melewati batas waktu penyampaian SPM sesuai dengan Direktorat Pelaksanaan Anggaran Nomor S-574/PB.2/2025 tanggal 28 Desember 2025 sebesar Rp239.200.000,00 dan transaksi RPATA sebesar Rp1.758.980.382,00 dengan rincian terlampir pada lampiran VI.e.



Nilai Ketuhanan



Nilai Kemanusiaan



Nilai Persatuan



Nilai Permasyarakatan



Nilai Keadilan Sosial

Utang Yang Belum Ditagihkan

Rp0,00

C.20 Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan tagihan karena adanya BAST dari pihak ketiga.

Ekuitas

Rp22.562.890.506,00

C.21 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp22.562.890.506,00 dan Rp33.112.159.071,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP Rp0,00

D.1 Pendapatan

Jumlah Pendapatan pada BPIP periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	0,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Tabel 56. Perbandingan Pendapatan PNBP per 31 Desember 2025 dan 2024

Beban Pegawai Rp85.843.392.450,00

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp85.843.392.450,00 dan Rp81.747.242.827,00. Beban Pegawai TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp4.096.149.623,00 atau 5,01 persen dengan rincian sebagai berikut:



*Perbandingan Rincian Beban Pegawai untuk periode
yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK/TURUN (%)
Beban Gaji Pokok PNS	15.201.207.160,00	14.486.808.200,00	4,93
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(928,00)	(9.128,00)	(89,83)
Beban Pembulatan gaji PNS	201.633,00	213.068,00	(5,37)
Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	(617.860,00)	0,00	0,00
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	945.075.198,00	934.239.790,00	1,16
Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	(123.572,00)	0,00	0,00
Beban Tunj. Anak PNS	243.650.261,00	237.353.510,00	2,65
Beban Tunj. Struktural PNS	1.681.090.000,00	1.705.820.000,00	(1,45)
Pengembalian beban Tunj. Struktural PNS	(10.270.000,00)	(555.050,00)	1.750,28
Beban Tunj. Fungsional PNS	972.712.000,00	732.400.000,00	32,81
Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	(2.480.000,00)	0,00	0,00
Beban Tunj. PPh PNS	213.939.037,00	207.814.518,00	2,95
Beban Tunj. Beras PNS	740.929.020,00	707.253.720,00	4,76
Beban Uang Makan PNS	1.485.290.000,00	1.078.791.000,00	37,68
Beban Tunjangan Umum PNS	321.770.000,00	361.410.000,00	(10,97)
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	(1.850.220,00)	(7.830.650,00)	(76,37)
Beban Gaji Pokok PPPK	2.272.549.400,00	961.080.000,00	136,46
Pengembalian Beban Gaji Pokok PPPK	(4.104.700,00)	0,00	0,00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	26.615,00	6.714,00	296,41
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	106.161.860,00	39.083.920,00	171,63
Beban Tunjangan Anak PPPK	29.314.148,00	11.020.384,00	166,00
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	257.765.000,00	160.872.000,00	60,23
Beban Tunjangan Beras PPPK	110.585.340,00	43.017.480,00	157,07
Beban Uang Makan PPPK	265.130.000,00	74.185.000,00	257,39
Beban Tunjangan Umum PPPK	44.570.000,00	0,00	0,00
Beban Uang Lembur	42.375.000,00	112.109.000,00	(62,20)
Beban Uang Lembur PPPK	17.925.000,00	1.150.000,00	1.458,70
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	56.655.509.059,00	58.151.290.765,00	(2,57)
Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	(14.582.000,00)	(8.730.467,00)	67,02
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK)	4.269.645.999,00	1.758.449.053,00	142,81
Jumlah	85.843.392.450,00	81.747.242.827,00	5,01

Tabel 57. Perbandingan Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024

Kenaikan Beban Pegawai sebesar Rp4.096.149.623,00 atau sebesar 5,01 persen dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2025, dikarenakan terdapat penambahan pejabat BPIP yang baru dilantik, penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kenaikan pangkat, dan kenaikan gaji secara berkala. Tidak terdapat selisih akun Beban Pegawai yang terdapat pada LRA dan LO.



Nilai Ketuhanan



Nilai Kemanusiaan



Nilai Persatuan



Nilai Permasyarakatan



Nilai Keadilan Sosial

Beban Persediaan
Rp4.146.426.241,00

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.146.426.241,00 dan Rp3.393.932.650,00 dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Persediaan
untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan
2024*

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK/TURUN (%)
Beban Persediaan Konsumsi	4.146.426.241,00	3.393.932.650,00	22,17
Jumlah Beban Persediaan	4.146.426.241,00	3.393.932.650,00	22,17

Tabel 58. Perbandingan Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024

Beban Persediaan TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp752.493.591,00 atau senilai 22,17 persen dibanding periode pelaporan yang sama pada tahun 2024 dikarenakan kenaikan kebutuhan dan pemakaian barang persediaan. Selisih Beban Persediaan yang terdapat pada LRA dan LO dikarenakan terdapat persediaan yang masih tercatat di neraca dan persediaan yang berasal dari pengadaan tahun anggaran lalu yang baru digunakan tahun ini.

**Beban Barang dan
Jasa**
Rp122.977.111.098,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp122.977.111.098,00 dan Rp104.390.594.785,00 dengan rincian sebagai berikut:



Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK/TURUN (%)
Beban Barang Keperluan Kantor	7.384.635.348,00	14.812.651.313,00	(50,15)
Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	0,00	(50.784.800,00)	0,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	19.593.265,00	4.358.600,00	349,53
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	639.876.000,00	482.928.000,00	32,50
Beban Barang Operasional Lainnya	5.474.781.266,00	2.174.825.846,00	151,73
Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	(15.935.100,00)	(1.707.234,00)	833,39
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00
Beban Bahan	10.275.071.605,00	12.207.379.366,00	(15,83)
Pengembalian Beban Bahan	0,00	0,00	0,00
Beban Honor Output Kegiatan	1.166.300.000,00	973.590.000,00	19,79
Beban Barang Non Operasional Lainnya	2.569.601.000,00	773.280.479,00	232,30
Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel	0,00	74.193.900,00	(100,00)
Beban Langganan Telepon	2.249.185,00	2.174.314,00	0,00
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa Konsultan	152.833.000,00	274.822.000,00	(44,39)
Beban Jasa Profesi	8.279.900.000,00	8.144.005.000,00	1,67
Pengembalian Beban Jasa Profesi	(113.755.000,00)	(28.982.024,00)	292,50
Beban Sewa	5.876.981.200,00	6.212.419.000,00	(5,40)
Beban Jasa Lainnya	81.264.979.329,00	58.335.441.025,00	39,31
Pengembalian Beban Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
Jumlah	122.977.111.098,00	104.390.594.785,00	17,80

Tabel 59. Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024

Beban Barang dan Jasa TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp18.586.516.313,00 atau senilai 17,80 persen dibanding periode pelaporan yang sama pada tahun 2024 dikarenakan kenaikan secara signifikan Beban Jasa Lainnya dan Beban Barang Non Operasional Lainnya. Selisih Beban Barang dan Jasa yang terdapat pada LRA dan LO dikarenakan terdapat jurnal akrual belanja barang yang masih harus dibayar.

**Beban Pemeliharaan**
Rp4.760.269.485,00**D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.760.269.485,00 dan Rp4.720.012.419,00. Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp40.257.066,00 atau 0,85 persen dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK/TURUN (%)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	34.259.140,00	(100,00)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	283.688.651,00	37.241.422,00	661,76
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.000.569.364,00	4.043.755.977,00	(1,07)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.975.500,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Lainnya	447.035.970,00	604.755.880,00	(26,08)
Jumlah	4.760.269.485,00	4.720.012.419,00	0,85

Tabel 60. Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 2024

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp40.257.066,00 dikarenakan terdapat penambahan kebutuhan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin.

Beban Perjalanan Dinas
Rp115.772.495.692,00**D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp115.772.495.692,00 dan Rp113.663.858.176,00. Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.108.637.516,00 atau 1,86 persen dibanding periode pelaporan yang sama pada 2024.



Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK/TURUN (%)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	115.772.495.692,00	113.663.858.176,00	1,86
Beban Perjalanan Biasa	16.736.539.442,00	25.883.175.408,00	(35,34)
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	(807.107.275,00)	(1.796.045.828,00)	(55,06)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.056.300.996,00	519.334.500,00	295,95
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	(433.197.045,00)	(3.435.000,00)	12.511,27
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	44.619.917.860,00	42.555.413.254,00	4,85
Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	(4.203.404.335,00)	(458.515.223,00)	816,74
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	57.281.019.947,00	50.366.481.253,00	13,73
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	(4.029.591.704,00)	(100,00)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0,00	(37.784.910,00)	(100,00)
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	522.426.102,00	664.826.426,00	(21,42)
Jumlah	115.772.495.692,00	113.663.858.176,00	1,86

Tabel 61. Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 2024

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.108.637.516,00 dikarenakan naiknya kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila ke daerah-daerah dan pelaksanaan tugas fungsi lainnya. Selisih Beban Perjalanan Dinas yang terdapat pada LRA dan LO dikarenakan terdapat koreksi akun atau pengembalian belanja.

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp12.030.558.705,00

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp12.030.558.705,00 dan Rp12.707.707.341,00 dengan rincian sebagai berikut:



Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK/TURUN (%)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	11.772.137.378,00	12.267.133.819,00	(4,04)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penyusutan	11.772.137.378,00	12.267.133.819,00	(4,04)
Beban Amortisasi <i>Software</i>	74.043.750,00	228.990.500,00	(67,67)
Beban Amortisasi Lisensi	141.171.652,00	141.171.652,00	0,00
Jumlah Amortisasi	215.215.402,00	370.162.152,00	(41,86)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	43.205.925,00	70.411.370,00	(38,64)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	0,00	0,00	0,00
Jumlah	43.205.925,00	70.411.370,00	(38,64)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	12.030.558.705,00	12.707.707.341,00	(5,33)

Tabel 62. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp677.148.636,00 atau senilai 5,33 persen dibanding periode pelaporan yang sama pada tahun 2024 dikarenakan berkurangnya belanja peralatan dan mesin, serta dilakukan penghapusan atas Aset Lain-Lain.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
(Rp51.111.933,00)

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar minus Rp51.111.933,00 dan Rp31.409.803,00 dengan rincian sebagai berikut.



Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK/TURUN (%)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya	(51,111,933.00)	31,409,803.00	(262.73)
Jumlah	(51,111,933.00)	31,409,803.00	(262.73)

Tabel 63. Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 2024

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2025 mengalami penurunan dikarenakan Piutang atas Pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dengan kualitas piutang macet masih tercatat.

**Kegiatan Non
Operasional
Rp340.002.574,00**

D.9 Kegiatan Non Operasional

Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK/TURUN (%)
Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar	11.967.846,00	41.295.375,00	(71,02)
Pendapatan Aset Non Lancar	60.018.700,00	141.909.000,00	(57,71)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	(48.050.854,00)	(100.613.625,00)	(52,24)
Surplus/(Defisit) dari Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	290.087.928,00	468.592.940,00	(38,09)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	290.087.928,00	468.592.940,00	(38,09)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	9.048.695,00	3.333.278,00	171,47
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	208.173.181,00	465.259.662,00	(55,26)
Pendapatan Kembali Belanja Modal TAYL	72.866.052,00	0,00	0,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) dari Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	37.946.800,00	0,00	0,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap p Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	37.946.800,00	0,00	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	340.002.574,00	509.888.315,00	(33,32)

Tabel 64. Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional



Penurunan pada Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp169.885.741,00 atau 33,32 persen pada tanggal pelaporan dibandingkan per 31 Desember TA 2025 dikarenakan terdapat Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar serta berkurangnya Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Pendapatan Aset Non Lancar berasal dari penjualan, lelang BMN (Barang Milik Negara), atau penghentian penggunaan aset yang sudah mencapai akhir masa manfaatnya dengan rincian pada lampiran VI.f, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL, Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL, serta Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL, dan Surplus dari Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan berasal dari Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.

Pos Luar Biasa
Rp0,00

D.10 POS LUAR BIASA

Rincian Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.



E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal**Rp33.112.159.071,00****E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp33.112.159.071,00 dan Rp39.371.190.479,00.

Defisit LO**(Rp345.139.139.164,00)****E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah defisit sebesar Rp345.139.139.164,00 dan Rp320.144.869.686,00.

**Koreksi Yang
Menambah atau
Mengurangi Ekuitas
(Rp72.865.452,00)**

E.3 Koreksi Yang Menambah atau Mengurangi Ekuitas

Koreksi Yang Menambah atau Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar minus Rp72.865.452,00 dan Rp42.985.624,00. Koreksi Yang Menambah atau Mengurangi Ekuitas pada tahun 2025 berasal dari Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi sebesar minus Rp72.866.052,00 berupa Koreksi Aset Tetap Renovasi dan Koreksi Lainnya sebesar Rp600,00 berupa Koreksi Saldo Piutang.

**Transaksi Antar
Entitas****Rp334.662.736.051,00****E.4 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp334.662.736.051,00 dan Rp313.842.852.654,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

*Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas*

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(760,835,039.00)
Ditagihkan ke Entitas Lain	336,456,506,238.00
Transfer Masuk	0.00
Transfer Keluar	(1,032,935,148.00)
Jumlah	334,662,736,051.00

Tabel 65. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar minus Rp760.835.039,00 sedangkan DKEL sebesar Rp336.456.506.238,00

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar minus Rp1.032.935.148,00.

E.5 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Nilai Kenaikan/Penurunan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp10.549.268.565,00 dan Rp6.259.031.408,00. Saldo Kenaikan/Penurunan Ekuitas TA 2025 berasal dari Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar minus Rp72.865.452,00 dan Transaksi Antar Ekuitas sebesar Rp334.662.736.051,00.

**Kenaikan/
Penurunan
Ekuitas****Rp10.549.268.565,00**



Ekuitas Akhir

Rp22.562.890.506,00

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp22.562.890.506,00 dan Rp 33.112.159.071,00.



F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.1.a. Penggunaan Sementara Tanah dan

Bangunan Berdasarkan Persetujuan Menteri Keuangan Nomor S-71/MK.6/WKN.07/2019 tanggal 11 Juli 2019 tentang Persetujuan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara pada Kementerian Sekretariat Negara oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Penggunaan Sementara Barang Milik Negara berupa Tanah dan Bangunan di Jalan Veteran III milik Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia antara Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor: PERJ-03/KSN/S/PB.03.01/03/2022 tanggal 18 Maret 2022 menyatakan bahwa Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut pihak pertama dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selanjutnya disebut pihak kedua, yang selanjutnya di dalam perjanjian tersebut Para Pihak sepakat menerangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang diperjanjikan yaitu:

- (a). Pihak pertama sepakat memberikan hak penggunaan sementara atas tanah seluas 2.100 m² (dua ribu seratus meter persegi) dan Sebagian bangunan tiga lantai seluas 1.594 m² (seribu lima ratus sembilan puluh empat meter persegi) kepada Pihak Kedua yang terletak di Jalan Veteran III No. 2 Jakarta Pusat yang merupakan bagian Sertifikat Hak Pakai Nomor 99, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;



- (b). Di atas tanah dimaksud berdiri bangunan gedung kantor tiga lantai milik Kementerian Sekretariat Negara. ;
- (c). Pihak Kedua selaku yang menggunakan sementara tanah dan bangunan yang berada di dalam kawasan Sertipikat Hak Pakai Nomor 99, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat guna menjalankan tugas dan fungsi Pihak Kedua.
- (d). Perjanjian ini dibuat berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.
 - e. Surat Kepala KPKNL Jakarta I an. Menteri Keuangan Nomor S45/MK.6/KNL.0702/2022 tanggal 11 Maret 2022 hal Persetujuan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara pada Kementerian Sekretariat Negara kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Penyerahan Barang Milik Negara tersebut tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Bangunan di Jalan Veteran III Milik Kementerian Sekretariat Negara Nomor BAST-



09/S/Um/PB.03.01/03/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

F.1.b. Tindaklanjut Laporan Hasil Audit Internal oleh Biro Pengawasan Internal BPIP atas Pengadaan barang dan Jasa Revitalisasi Ruang Kerja/Kantor BPIP Tahun 2024

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Pengawasan Internal Nomor 23/PW/01/2025/- tanggal 31 Januari 2025 perihal Penyampaian Laporan Hasil Audit atas Pengadaan Barang dan Jasa Revitalisasi Ruang Kerja/Kantor BPIP Tahun 2024, terdapat kekurangan volume atas Pekerjaan Revitalisasi Ruang Kerja/Kantor BPIP sebesar Rp72.866.052,49. Hal tersebut telah ditindaklanjuti pada periode pelaporan semester I tahun 2025 berupa pengakuan piutang dengan penyisihan piutang kategori macet senilai 100% dari nilai piutang.

F.1.c. Realisasi Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2024

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional IV Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Pagu Anggaran PN IV adalah Rp114.778.181.000,00 dan total realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp112.838.527.240,00. Beberapa Program/Kegiatan dalam PN IV ini antara lain sebagai berikut:



Nilai Ketuhanan

Nilai Kemanusiaan

Nilai Persatuan

Nilai Permasyarakatan

Nilai Keadilan Sosial

NO	PROGRAM PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	PAGU	REALISASI	%	TARGET	SATUAN OUTPUT	CAPAIAN OUTPUT
A	B	C	D	E	F	G	H
Prioritas Nasional 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan							
Program Prioritas 1: Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokoh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter							
1.6 Kegiatan Prioritas: Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme							
1.6.1 Proyek Prioritas: Pembinaan Ideologi Pancasila, Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan, Nilai-Nilai Kebangsaan dan Bela Negara							
1	Rekomendasi Kajian Kebijakan Strategis Pembinaan Ideologi Pancasila**	4.350.000.000,00	4.313.954.527,00	99,17%	2	Rekomendasi Kebijakan	2
2	Rekomendasi Kebijakan Strategis Diklat PIP**	255.000.000,00	254.661.278,00	99,87%	3	Rekomendasi Kebijakan	4
3	Akreditasi Lembaga Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila**	1.620.691.000,00	1.617.103.007,00	99,78%	10	Lembaga	23
4	NSPK Standardisasi Dan Kurikulum Pendidikan Dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila**	3.335.604.000	2.978.188.101	89,28%	7	NSPK	12
5	Sertifikasi Pendidik Dan Pelatih Diklat PIP**	1.636.381.000	1.635.918.362	99,97%	200	Orang	572
6	Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila**	3.547.564.000	3.482.920.697	98,18%	500	Layanan	105
7	Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila**	8.734.716.000	8.686.713.043	99,45%	1500	Layanan	857
8	fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan Paskibraka Dan Purnapaskibraka Duta Pancasila**	26.295.619.000	25.942.354.115	98,66%	6600	Orang	5820
1.6.2 Proyek Prioritas: Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)							
9	Kesepakatan Koordinasi dan Sinkronisasi hubungan dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Bidang Prioritas**	2.592.296.000	2.579.145.870	99,49%	20	Kesepakatan	45
10	Kesepakatan Koordinasi dan Sinkronisasi hubungan dengan Organisasi Sosial, Politik, serta Komponen Masyarakat Lainnya Bidang Prioritas**	2.897.031.000	2.881.628.924	99,47%	25	Kesepakatan	24
11	Layanan Sosialisasi Kepada Kementerian/Lembaga/Daerah**	25.330.656.000	24.573.866.888	97,01%	5	Dokumen	5
12	Layanan Komunikasi melalui Media Massa**	10.013.497.000	9.932.326.538	99,19%	4	Dokumen	4
13	Fasilitasi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Relawan Gerakan Kebijakan Pancasila**	14.064.797.000	14.064.464.875	100,00%	150	Kelompok Masyarakat	150
14	Rekomendasi Hasil Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila**	4.865.000.000	4.828.668.155	99,25%	1	Rekomendasi Kebijakan	1
1.6.3 Proyek Prioritas: Harmonisasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang Bertentangan dengan Ideologi Pancasila							
15	Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Yang Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Pancasila**	2.965.000.000	2.912.490.197	98,57%	3	Rekomendasi Kebijakan	3
1.6.4 Proyek Prioritas: Membersihkan Unsur-Unsur yang Mengancam Ideologi Negara							
16	Rekomendasi Hasil Evaluasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Terindikasi Menentang Ideologi Negara**	814.770.000	730.492.027	89,56%	1	Rekomendasi Kebijakan	1
17	Rekomendasi Hasil Evaluasi Penyelenggara Negara Dan Asn Yang Terindikasi Menentang Ideologi Negara**	727.693.000	684.158.019	94,02%	1	Rekomendasi Kebijakan	1
18	Rekomendasi Hasil Evaluasi Ormas, Organisasi dan Perusahaan Asing, serta Media yang menentang Ideologi Negara**	731.866.000	729.472.602	99,57%	1	Rekomendasi Kebijakan	1
JUMLAH		114.778.181.000,00	112.838.527.240,00	98,31%			

Tabel 66. Realisasi Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2025

F.1.d. Realisasi Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Klasifikasi Fungsi dirinci dalam sebelas fungsi sebagai berikut: (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan dan



Nilai Ketuhanan

Nilai Kemanusiaan

Nilai Persatuan

Nilai Demokrasi

Nilai Keadilan Sosial

(11) perlindungan sosial. Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2025 pada BPIP antara lain sebagai berikut:

PROGRAM/KEGANTUNGAN/OUTPUT	BELANJA			KELUARAN			
	ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	SATUAN	%
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI/PANCASILA	374,428,347,000.00	336,460,837,386.00	89.88%				
AH Program Pembinaan Ideologi Pancasila	178,953,120,000.00	156,454,081,359.00	87.43%				
6926 Penyelenggaraan Program Strategis Hubungan Antar Lembaga, S	86,368,304,000.00	75,577,331,380.00	87.51%				
ABN Kebijakan Bidang Sosial	6,192,816,000.00	5,789,651,594.00	93.17%				
001 Rekomendasi Hubungan Kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila	3,030,522,000.00	2,768,160,263.00	91.34%	2.00	2.00	Rekomendasi Kebijakan	100.00%
002 Rekomendasi Hasil Sosialisasi dan Komunikasi Ideologi Pancasila	1,007,074,000.00	917,167,746.00	91.07%	1.00	1.00	Rekomendasi Kebijakan	100.00%
003 Rekomendasi Hasil Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila	2,155,220,000.00	2,084,323,585.00	96.71%	2.00	2.00	Rekomendasi Kebijakan	100.00%
BDC Fasilitas dan Pembinaan Pengusutanaman Nilai Pancasila dan Pembudayaan Gerakan Relawan Pancasila	25,000,000,000.00	24,124,888,158.00	96.50%				
001 Fasilitas dan Pembinaan Pengusutanaman Nilai Pancasila dan Pembudayaan Gerakan Relawan Pancasila	25,000,000,000.00	24,124,888,158.00	96.50%	1500.00	21447.00	Kesejahteraan	1429.80%
002 Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	20,842,896,000.00	19,820,434,073.00	95.09%				
001 Fasilitas Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Relawan Gerakan Kabupaten Pancasila	20,842,896,000.00	19,820,434,073.00	95.09%	217.00	275.00	Kelompok Masyarakat	126.73%
QMB Komunikasi Publik	34,332,592,000.00	25,862,357,566.00	75.33%				
001 Layanan Sosialisasi Kepada Kementerian/Lembaga/Desa/ra	30,052,104,000.00	21,672,720,858.00	72.12%	7.00	7.00	Layanan	100.00%
002 Layanan Komunikasi melalui Media Massa	4,280,488,000.00	4,189,636,707.00	97.88%	3.00	3.00	Layanan	100.00%
6927 Pelaksanaan Analisis dan Penyeragaman Hukum, Advokasi, serta	13,417,175,000.00	11,453,243,182.00	85.36%				
ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	2,112,366,000.00	1,981,108,565.00	93.79%				
001 Rekomendasi Hasil Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila terhadap LTNKLD	880,633,000.00	845,654,622.00	96.03%	1.00	1.00	Rekomendasi Kebijakan	100.00%
002 Rekomendasi Hasil Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila terhadap Organisasi Sosial dan Politik serta Komponen Masyarakat Lainnya	1,231,733,000.00	1,135,453,943.00	92.18%	3.00	3.00	Rekomendasi Kebijakan	100.00%
PBD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	11,304,809,000.00	9,472,134,617.00	83.79%				
001 Rekomendasi Hasil Analisis dan Penyeragaman Rancangan Produk Hukum Yang Bertentangan Dengan Nilai Pancasila	8,647,759,000.00	7,364,657,631.00	85.16%	6.00	6.00	Rekomendasi Kebijakan	100.00%
002 Rekomendasi Hasil Pengawasan Kebijakan dan Regulasi Yang Bertentangan Dengan Nilai Pancasila	2,657,050,000.00	2,107,476,986.00	79.32%	3.00	3.00	Rekomendasi Kebijakan	100.00%
6928 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi	15,965,203,000.00	11,761,657,565.00	73.67%				
ABN Kebijakan Bidang Sosial	3,531,917,000.00	3,439,747,393.00	97.39%				
001 Rekomendasi Hasil Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	3,531,917,000.00	3,439,747,393.00	97.39%	1.00	1.00	Rekomendasi Kebijakan	100.00%
PBC Kebijakan Bidang Politik	4,808,319,000.00	4,581,795,251.00	95.29%				
001 Rekomendasi Kajian Kebijakan Strategis Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila	4,808,319,000.00	4,581,795,251.00	95.29%	1.00	1.00	NSPK	100.00%
PBH Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	7,624,973,000.00	3,740,114,921.00	49.05%				
001 Rekomendasi Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	7,624,973,000.00	3,740,114,921.00	49.05%	2.00	2.00	Rekomendasi Kebijakan	100.00%
6929 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi	52,058,965,000.00	47,864,967,036.00	91.94%				
AFA Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	1,202,304,000.00	1,094,918,548.00	91.07%	7.00	10.00	NSPK	142.86%
001 NSPK Standardisasi dan Kurikulum Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila	1,202,304,000.00	1,094,918,548.00	91.07%	7.00	10.00	NSPK	142.86%
BOC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	35,056,595,000.00	32,540,411,134.00	92.82%	6732.00	7209.00	Orang	107.08%
001 Fasilitas Pembinaan Pemasok/Barang Duta Pancasila	35,056,595,000.00	32,540,411,134.00	92.82%	6732.00	7209.00	Orang	107.08%
PDE Akreditasi Lembaga	1,995,935,000.00	1,851,665,837.00	92.77%	15.00	15.00	Lembaga	100.00%
001 Akreditasi Lembaga Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila	1,995,935,000.00	1,851,665,837.00	92.77%	15.00	15.00	Lembaga	100.00%
PDI Sertifikasi Profesi dan SDM	4,736,097,000.00	4,255,563,264.00	89.85%	593.00	751.00	Orang	126.64%
001 Sertifikasi Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila	4,736,097,000.00	4,255,563,264.00	89.85%	593.00	751.00	Orang	126.64%
SCJ Pelatihan Bidang Sosial	9,066,034,000.00	8,122,107,253.00	89.59%	8520.00	10634.00	Orang	127.16%
001 Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	9,066,034,000.00	8,122,107,253.00	89.59%	8520.00	10634.00	Orang	127.16%
6930 Pengendalian dan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila	11,145,467,000.00	9,797,142,186.00	87.90%				
ABC Kebijakan Bidang Politik	5,203,802,000.00	4,913,565,151.00	94.42%				
001 Rekomendasi Hasil Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila	2,443,699,000.00	2,224,810,610.00	91.03%	1.00	1.00	Rekomendasi Kebijakan	100.00%
002 Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila	2,759,863,000.00	2,688,774,541.00	97.42%	1.00	1.00	Rekomendasi Kebijakan	100.00%
PBC Kebijakan Bidang Politik	2,817,639,000.00	2,307,522,450.00	81.89%				
001 Rekomendasi Hasil Pengukuran Pelaksanaan Pancasila	2,817,639,000.00	2,307,522,450.00	81.89%	2.00	2.00	Rekomendasi Kebijakan	100.00%
PBN Kebijakan Bidang Sosial	3,123,826,000.00	2,576,074,565.00	82.47%				
001 Rekomendasi Hasil Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila	3,123,826,000.00	2,576,074,565.00	82.47%	1.00	1.00	Rekomendasi Kebijakan	100.00%
WA Program Dukungan Manajemen	195,475,227,000.00	180,006,756,027.00	92.09%				
6925 Penyelenggaraan Dukungan Manajemen	195,475,227,000.00	180,006,756,027.00	92.09%				
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	177,702,025,000.00	163,383,242,433.00	91.95%				
001 Layanan Manajemen Ases	576,330,000.00	147,125,363.00	25.53%	1.00	1.00	Layanan	100.00%
002 Layanan Tata Kelola dan Informasi	9,217,573,000.00	3,290,388,012.00	35.70%	1.00	1.00	Layanan	100.00%
956 Layanan BMN	58,108,000.00	40,658,175.00	69.97%	1.00	1.00	Layanan	100.00%
957 Layanan Hukum	15,100,000,000.00	14,628,548,406.00	96.88%	1.00	1.00	Layanan	100.00%
958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	458,000,000.00	431,296,000.00	94.17%	1.00	1.00	Layanan	100.00%
959 Layanan Protokol	14,138,123,000.00	11,571,786,336.00	81.94%	1.00	1.00	Layanan	100.00%
960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	902,588,000.00	854,656,724.00	94.69%	1.00	1.00	Layanan	100.00%

Tabel 67. Realisasi Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN



Nilai Ketuhanan

Nilai Kemanusiaan

Nilai Persatuan

Nilai Permasyarakatan

Nilai Keadilan Sosial

PROGRAM/KEGATAN/RINCIAN OUTPUT	BELANJA			KELUARAN			
	ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	SATUAN	%
WA Program Dukungan Manajemen	188,262,995,000,00	186,733,520,784,00	98,66%				
6825 Penyelenggaraan Dukungan Manajemen	188,262,995,000,00	186,733,520,784,00	98,66%				
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	161,151,924,000,00	158,728,161,555,00	98,12%				
031 Layanan Manajemen Aset	695,000,000,00	691,581,480,00	98,51%	1,00	1,00	Layanan	100,00%
032 Layanan Tata Kelola dan Informasi	7,062,563,000,00	6,926,469,688,00	98,07%	1,00	1,00	Layanan	100,00%
956 Layanan BIN	139,000,000,00	132,194,220,00	95,10%	1,00	1,00	Layanan	100,00%
957 Layanan Hukum	6,671,526,000,00	6,558,168,174,00	98,30%	1,00	1,00	Layanan	100,00%
958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	413,000,000,00	411,060,000,00	99,53%	1,00	1,00	Layanan	100,00%
959 Layanan Protokol	22,024,437,000,00	21,905,253,318,00	99,46%	1,00	1,00	Layanan	100,00%
960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,578,474,000,00	1,568,513,840,00	99,37%	1,00	1,00	Layanan	100,00%
962 Layanan Umum	1,166,000,000,00	1,158,640,501,00	99,37%	1,00	1,00	Layanan	100,00%
963 Layanan Data dan Informasi	3,738,000,000,00	3,735,833,171,00	99,94%	1,00	1,00	Layanan	100,00%
994 Layanan Perencanaan	117,663,924,000,00	116,640,457,163,00	99,13%	1,00	1,00	Layanan	100,00%
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	7,010,000,000,00	6,590,870,418,00	94,02%				
951 Layanan Sarana Internal	7,010,000,000,00	6,590,870,418,00	94,02%	40,00	429,00	Unit	1072,50%
EBD Layanan Manajemen SDM Internal	7,000,000,000,00	6,444,689,670,00	92,07%				
954 Layanan Manajemen SDM	5,966,603,000,00	5,606,881,685,00	93,97%	441,00	706,00	Orang	160,08%
996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	1,033,397,000,00	837,817,985,00	81,07%	95,00	401,00	Orang	422,11%
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	14,101,071,000,00	13,989,789,141,00	99,07%				
071 Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	5,977,571,000,00	5,970,777,074,00	99,89%	1,00	1,00	Dokumen	100,00%
073 Layanan Penyusunan Laporan Monev	610,861,000,00	601,143,060,00	98,41%	1,00	1,00	Dokumen	100,00%
952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	27,000,000,00	24,491,410,00	90,71%	3,00	3,00	Dokumen	100,00%
953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,508,639,000,00	1,474,426,211,00	97,73%	6,00	6,00	Dokumen	100,00%
955 Layanan Manajemen Keuangan	1,727,000,000,00	1,675,217,761,00	97,00%	1,00	1,00	Dokumen	100,00%
965 Layanan Audit Internal	2,400,000,000,00	2,385,202,365,00	99,38%	1,00	1,00	Dokumen	100,00%
974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1,850,000,000,00	1,838,532,260,00	99,38%	1,00	1,00	Dokumen	100,00%

Tabel 68 .Realisasi Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN

Jakarta, 6 Mei 2026

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,



YUDIAN WAHYUDI



Nilai Ketuhanan

Nilai Kemanusiaan

Nilai Persatuan

Nilai Permasyarakatan

Nilai Keadilan Sosial

VI. LAMPIRAN DAN DAFTAR

Lampiran VI.a : Penyusutan Barang

**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
LAPORAN PENYUSUTAN BARANG
INTRAKOMPTABEL
PER 31 DESEMBER 2025**

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
132111	Peralatan dan Mesin	4.219	81.060.842.622	(53.115.750.092)	(9.721.139.047)	(62.836.889.139)	18.223.953.483
3010305	POMPA	3	8.987.500	(2.200.000)	(1.283.928)	(3.483.928)	5.503.572
3020101	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	36	20.380.900.000	(13.730.150.014)	(2.911.557.140)	(16.641.707.154)	3.739.192.846
3020102	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	28	10.018.800.000	(5.655.928.596)	(1.336.357.134)	(6.992.285.730)	3.026.514.270
3020103	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	2	735.360.000	(115.025.714)	(105.051.428)	(220.077.142)	515.282.858
3020104	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	39	868.765.800	(396.590.734)	(124.109.397)	(520.700.131)	348.065.669
3020105	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	1	418.500.000	-29892857,00	(59.785.714)	(89.678.571)	328.821.429
3020201	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	2	12.380.608	(12.380.608)	0,00	(12.380.608)	0,00
3030101	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	2	6.933.000	(2.805.250)	(693.300)	(3.498.550)	3.434.450
3030102	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH)	1	2.200.000	(770.000)	(220.000)	(990.000)	1.210.000
3030204	PERKAKAS PENGANGKAT	1	1.980.000	(1.386.000)	(396.000)	(1.782.000)	198.000
3030205	PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	5	11.880.000	(9.636.000)	(1.716.000)	(11.352.000)	528.000
3030206	PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOLS)	2	2.002.000	(1.201.198)	(400.400)	(1.601.598)	400.402
3030212	PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM	2	10.450.000	(4.180.000)	(2.090.000)	(6.270.000)	4.180.000
3030301	ALAT UKUR UNIVERSAL	3	6.187.500	(5.568.750)	(618.750)	(6.187.500)	-
3040104	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN	1	9.955.000	(7.466.250)	(2.488.750)	(9.955.000)	-
3050102	MESIN HITUNG / MESIN JUMLAH	1,00	1950000,00	-1950000,00	0,00	-1950000,00	0,00
3050104	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	207	1.351.131.600	(1.051.996.230)	-132336096,00	(1.184.332.326)	166799274,00
3050105	ALAT KANTOR LAINNYA	175	3.124.273.303	(1.944.158.387)	(281.231.865)	(2.225.390.252)	898.883.051
3050199	ALAT KANTOR LAINNYA	41	65.050.000	(40.597.000)	(13.010.000)	(53.607.000)	11.443.000
3050201	MEUBELAIR	1.085	2.903.231.362	(2.200.368.549)	(168.507.153)	(2.368.875.702)	534.355.660
3050203	ALAT PEMBERSIH	30	406.253.500	(233.726.000)	(76.988.200)	(310.714.200)	95.539.300
3050204	ALAT PENDINGIN	155	1.233.589.398	(910.124.360)	(100.298.840)	(1.010.423.200)	223.166.198
3050205	ALAT DAPUR	14	139.903.616	(79.536.666)	(14.062.700)	(93.599.366)	46.304.250
3050206	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	468	3.588.095.935	(2.260.331.616)	(429.032.523)	(2.689.364.139)	898.731.796
3050299	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA	8	122.214.150	(44.409.660)	(24.442.830)	(68.852.490)	53.361.660
3060101	PERALATAN STUDIO AUDIO	179	3.819.580.713	(1.398.378.263)	(689.228.663)	(2.087.606.926)	1.731.973.787
3060102	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	142	3.310.790.678	(1.533.202.550)	(612.903.678)	(2.146.106.228)	1.164.684.450
3060103	PERALATAN STUDIO GAMBAR	2	2.746.000	(1.373.000)	(549.200)	(1.922.200)	823.800
3060104	PERALATAN CETAK	3	27.996.500	(27.996.500)	-	(27.996.500)	-
3060105	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/ PERALATAN UKUR TANAH	49	77.424.165	(7.742.441)	(15.484.833)	(23.227.274)	54196891,00
3060199	ALAT STUDIO LAINNYA	28	288.118.400	-164435520,00	(57.623.680)	(222.059.200)	66.059.200
3060201	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	130	1.502.391.290	(733.866.267)	(240.269.022)	(974.135.289)	528.256.001
3060319	SWITCHER ANTENA	1	75.924.000	(22.777.200)	(7.592.400)	(30.369.600)	45.554.400



Nilai Ketuhanan

Nilai Kemanusiaan

Nilai Persatuan

Nilai Permasyarakatan

Nilai Keadilan Sosial

Lampiran VI.a : Penyusutan Barang

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
3060323	PROGRAM INPUT EQUIPMENT	2	175.802.000	(8.790.100)	(17.580.200)	(26.370.300)	149.431.700
3060334	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA UHF	10	105.000.000	(5.250.000)	(10.500.000)	(15.750.000)	89.250.000
3060347	SUMBER TENAGA	15	164.532.000	(11.724.600)	(16.453.200)	(28.177.800)	136.354.200
3070101	ALAT KEDOKTERAN UMUM	12	40.555.000	(14.501.500)	(8.111.000)	(22.612.500)	17.942.500
3070201	ALAT KESEHATAN MATRA LAUT	1	36.080.000	(28.864.000)	(7.216.000)	(36.080.000)	0,00
3070299	ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA	1	33.600.000	(26.880.000)	(6.720.000)	(33.600.000)	0,00
3080113	ALAT LABORATORIUM KIMIA	2	18.859.500	(8.251.033)	(2.357.438)	(10.608.471)	8.251.029
3080133	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGOLAHAN PANAS	2	2.157.840	(404.596)	(269.730)	(674.326)	1.483.514
3080134	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI TEKSTIL	1	12.622.500	(6.311.248)	(1.577.813)	(7.889.061)	4.733.439
3080141	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	27	79.818.000	(32.136.255)	(9.977.249)	(42.113.504)	37.704.496
3080163	ALAT PENGUKUR GELOMBANG	3	318.877.600	(179.368.651)	(39.859.700)	(219.228.351)	99.649.249
3080305	SYSTEM/POWER SUPPLY	6	13.200.000	(3.079.986)	(879.996)	(3.959.982)	9.240.018
3080806	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENSTASI LAINNYA	3	3.300.000	(825.000)	(330.000)	(1.155.000)	2.145.000
3090202	NON SENJATA API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3090203	ALAT PENJINAK BAHAN PELEDAK (ALJIHANDAK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3090402	ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA	14	479.554.500	(259.392.438)	(102.744.437)	(362.136.875)	117.417.625
3090405	ALSUS LANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3090407	ALSUS FOTOGRAFI KEPOLISIAN	7	10.118.000	(5.700.500)	(1.767.000)	(7.467.500)	2.650.500
3100102	PERSONAL KOMPUTER	734	14.835.767.086	(8.690.389.236)	(2.446.733.715)	(11.137.122.951)	3.698.644.135
3100201	PERALATAN MAINFRAME	69	141.105.000	(35.276.250)	(35.276.250)	(70.552.500)	70.552.500
3100202	PERALATAN MINI KOMPUTER	10	276.200.000	(105.200.000)	(68.400.000)	(173.600.000)	102.600.000
3100203	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	453	4.067.989.400	(1.872.916.334)	(574.040.916)	(2.446.957.250)	1.621.032.150
3100204	PERALATAN JARINGAN	53	5.684.330.055	(5.128.870.365)	(409.584.577)	(5.538.454.942)	145.875.113
3110102	UKUR/INSTRUMENT	2	19.100.000	(5.730.000)	(3.820.000)	(9.550.000)	9.550.000
3150201	BAJU PENGAMAN	1	1.980.000	(792.000)	(396.000)	(1.188.000)	792.000
3150203	TOPI KERJA	1	1.430.000	(572.000)	(286.000)	(858.000)	572.000
3150205	SEPATU LAPANGAN	1	2.860.000	(1.144.000)	(572.000)	(1.716.000)	1.144.000
3150302	ALAT PENDUKUNG PENCARIAN	1	177.320.000	(177.320.000)	0,00	(177.320.000)	0,00
3150401	PERALATAN FASILITAS KOMUNIKASI PENERBANGAN	3	7.425.000	(2.598.750)	(742.500)	(3.341.250)	4.083.750
3150404	PERALATAN FASILITAS BANTU PELAYANAN DAN PENGAMANAN BANDAR UDARA	1	8.991.000	(1.348.650)	(899.100)	(2.247.750)	6.743.250
3150405	PERALATAN FASILITAS IISTRIK BANDAR UDARA	6	197.445.000	(31.241.250)	(19.744.500)	(50.985.750)	146.459.250
3180102	RAMBU TIDAK BERSUAR	37	49.379.000	(28.216.524)	(7.054.158)	(35.270.682)	14.108.318
3180205	SIGNAL	1	9.850.000	(1.970.000)	(1.970.000)	(3.940.000)	5.910.000
3190102	PERALATAN PERMAINAN	2	13.425.000	0,00	(3.758.333)	(3.758.333)	9.666.667
3190103	PERALATAN SENAM	3	37.940.000	0,00	(6.323.334)	(6.323.334)	31.616.666
135111	Aset Tetap Renovasi	4	172.460.052	-	0,00	0,00	172.460.052
6070301	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	3	172.460.052	0,00	0,00	0,00	172.460.052
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	72	156.477.920	(864.166.210)	712.268.990	(151.897.220)	4.580.700
3020101	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	0	0,00	-24300000,00	24.300.000	0,00	0,00
3050101	MESIN KETIK	-	0,00	(14.485.000)	14.485.000	0,00	0,00
3050104	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	-	0,00	(9.430.000)	9.430.000	0,00	0,00
3050105	ALAT KANTOR LAINNYA	1	5.199.000	(237.701.000)	234.061.700	(3.639.300)	1.559.700
3050201	MEUBELAIR	-	0,00	(2.230.000)	2.230.000	0,00	0,00
3050205	ALAT DAPUR	-	-	(15.128.700)	15.128.700	0,00	0,00
3050206	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	0	0,00	(686.500)	686.500	0,00	0,00
3060201	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	1	37.415.000	(33.673.500)	(3.741.500)	(37.415.000)	0,00
3100102	PERSONAL KOMPUTER	5	113.863.920	(505.831.510)	394.988.590	(110.842.920)	3.021.000
3100203	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	-	-	(20.700.000)	20.700.000	-	0,00
JUMLAH		4.433	82.293.241.554	(43.193.058.988)	(10.784.269.814)	(53.977.328.802)	28.315.912.752



Lampiran VI.b : Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu

NO	TGL DOK	NO DOKUMEN	DESKRIPSI	JUMLAH
1	08-01-25	3470048VVNNLF7D4	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	50.790,00
2	08-01-25	C3BF96U8F7EQM8KI	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	50.790,00
3	08-01-25	A8D090NA0DE3RCA5	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	48.370,00
4	08-01-25	7AB3B55DFIA1S88L	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	50.790,00
5	08-01-25	49C4861QVCSF8SNB	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	380.940,00
6	08-01-25	0583B61QVCSF8S9O	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	190.470,00
7	08-01-25	2B04C6U8F7EQMASV	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	48.370,00
8	08-01-25	997D655DFIA1SACR	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	1.549.095,00
9	08-01-25	AD00048VVNNLF6D4	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	63.490,00
10	08-01-25	D4AD90NA0DE3R7LD	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	126.975,00
11	08-01-25	F54C77QLV217364C	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	95.235,00
12	08-01-25	781C11JNG80G890O	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	76.185,00
13	08-01-25	5D1923CIFT5928GR	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	355.530,00
14	08-01-25	C55033CIFT5929KH	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	355.530,00
15	08-01-25	71E3B3CIFT592AKK	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	62.881,00



Nilai Ketuhanan

Nilai Kemanusiaan

Nilai Persatuan

Nilai Permasyarakatan

Nilai Keadilan Sosial

NO	TGL DOK	NO DOKUMEN	DESKRIPSI	JUMLAH
16	08-01-25	3D82C1JNG80G8989	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	82.537,00
17	08-01-25	9EF327QLV2173ANB	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	425.656,00
18	08-01-25	471C86U8F7ERLTKP	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	349.195,00
19	08-01-25	CD9D50NA0DE4QSRP	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	158.725,00
20	08-01-25	4256448VVNNLF95M	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	76.185,00
21	08-01-25	8418D3CIFT5A1UG8	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	336.497,00
22	08-01-25	2CE141JNG80G89AM	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	82.537,00
23	08-01-25	3E9411JNG80G8B07	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	48.370,00
24	08-01-25	4B39555DFIA1S7LL	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	109.954,00
25	08-01-25	7610B48VVNNLF9NM	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	380.940,00
26	08-01-25	1769C2G502ISL80I	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	349.195,00
27	08-01-25	56EFE0NA0DE3R8NB	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	396.162,00
28	08-01-25	5EDDB6U8F7EQM6RD	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	456.732,00
29	08-01-25	072ED2G502ISLAR4	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	48.370,00
30	08-01-25	6ABB70NA0DE3RAE2	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	76.185,00



Nilai Ketuhanan

Nilai Kemanusiaan

Nilai Persatuan

Nilai Permasyarakatan

Nilai Keadilan Sosial

NO	TGL DOK	NO DOKUMEN	DESKRIPSI	JUMLAH
31	08-01-25	BF9162G502ISL9D3	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	76.185,00
32	08-01-25	AE96E3CIFT592860	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	50.790,00
33	08-01-25	908E248VVNNMETOE	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	190.470,00
34	08-01-25	D34B848VVNNLFAOF	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	304.731,00
35	08-01-25	D6E087QLV217367D	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	63.490,00
36	08-01-25	8C6496U8F7EQM9M7	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	177.772,00
37	08-01-25	C3CF13CIFT59298E	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	101.580,00
38	08-01-25	DECD81JNG80G85AO	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	61.850,00
39	08-01-25	BF88F0NA0DE3R8IQ	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	63.490,00
40	08-01-25	E527548VVNNLF573	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	751.850,00
41	08-01-25	D5A6E6U8F7EQM7OD	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	101.580,00
42	08-01-25	2768561QVCSE98EL	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	368.242,00
43	08-01-25	20E5C55DFIA1S6LK	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	95.235,00
44	08-01-25	57E727QLV21738CJ	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	1.295.145,00
45	08-01-25	2423A1JNG80G88H1	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	63.490,00



★ Nilai Ketuhanan

🚦 Nilai Kemanusiaan

🌳 Nilai Persatuan

🇮🇩 Nilai Permasyarakatan

🌱 Nilai Keadilan Sosial

NO	TGL DOK	NO DOKUMEN	DESKRIPSI	JUMLAH
46	08-01-25	6C98A55DFIA1SA9R	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	66.027,00
47	08-01-25	C330B61QVCSE99TS	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	63.490,00
48	08-01-25	7FA3161QVCSE9735	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	832.956,00
49	08-01-25	6E62B1JNG80G87FP	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	169.160,00
50	08-01-25	D75E21JNG80G86BS	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	109.954,00
51	08-01-25	01C9261QVCSE993J	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	698.390,00
52	08-01-25	7A3323CIFT5929Q5	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	294.582,00
53	08-01-25	474B96U8F7EQM7IP	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	84.580,00
54	08-01-25	972C16U8F7EQMC8K	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	561.092,00
55	08-01-25	492F03CIFT5926U1	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	321.404,00
56	08-01-25	1DE6F7QLV21739KD	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	82.537,00
57	08-01-25	571E20NA0DE3R7QC	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	317.450,00
58	08-01-25	D553C3CIFT5A1TBO	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	63.490,00
59	08-01-25	876CA3CIFT5929PQ	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	165.074,00
60	08-01-25	B812B7QLV21735TE	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	470.060,00



NO	TGL DOK	NO DOKUMEN	DESKRIPSI	JUMLAH
61	08-01-25	C4FAB55DFIA1S915	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	126.980,00
62	08-01-25	4053055DFIA1S7HM	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	66.027,00
63	08-01-25	9CD9A0NA0DE3R8KP	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	825.370,00
64	08-01-25	BF58848VVNNLFAIU	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	464.352,00
65	08-01-25	9A02355DFIA33HQ3	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	145.110,00
66	08-01-25	109152G502ISL6F8	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	109.954,00
67	08-01-25	50A036U8F7EQM75O	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	228.555,00
68	08-01-25	669923CIFT5A1T6B	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	1.142.820,00
69	08-01-25	DEAEF1JNG80G89MD	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	279.345,00
70	08-01-25	D110448VVNNLF86R	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	63.490,00
71	08-01-25	4CB5B48VVNNLF9GJ	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	142.212,00
72	08-01-25	0A3086U8F7EQMAHG	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	198.317,00
73	08-01-25	5C26B2G502ISL797	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	84.580,00
74	08-01-25	0CEEC7QLV217384V	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	82.537,00
75	08-01-25	122881JNG80G85UJ	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	190.470,00



Nilai Ketuhanan

Nilai Kemanusiaan

Nilai Persatuan

Nilai Permasyarakatan

Nilai Keadilan Sosial

NO	TGL DOK	NO DOKUMEN	DESKRIPSI	JUMLAH
76	08-01-25	A19326U8F7EQM4PK	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	63.490,00
77	08-01-25	EC3A061QVCSE99RO	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	285.705,00
78	08-01-25	8F9912G502ISL8MV	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	380.940,00
79	08-01-25	CEA340NA0DE3R82K	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	406.320,00
80	08-01-25	1044D1JNG80G8AUH	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	304.731,00
81	08-01-25	B98FB55DFIA1S8VO	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	152.370,00
82	08-01-25	5E9C37QLV21739CF	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	165.074,00
83	08-01-25	6F16E2G502ISL8V3	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	82.537,00
84	08-01-25	01D0C61QVCSF8TFT	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	723.786,00
85	08-01-25	35CB60NA0DE3R9T4	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	294.582,00
86	08-01-25	4520E61QVCSE9CE5	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	115.175,00
87	08-01-25	7626048VVNNLFC7E	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	111.251,00
88	08-01-25	B9BBD48VVNNL772	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	84.580,00
89	08-01-25	C168155DFIA1SAFN	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	50.790,00
90	08-01-25	C1DC06U8F7EQM7CK	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	126.870,00
91	09-01-25	FB4352G502ISL67P	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	185.550,00
92	09-01-25	84D953CIFT592637	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	1.249.370,00
93	09-01-25	CC8396U8F7EQM5L7	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	123.700,00
94	09-01-25	0516F48VVNNL82L	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	349.195,00
95	09-01-25	A1FDC6U8F7EQM6RP	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	76.185,00



Nilai Ketuhanan

Nilai Kemanusiaan

Nilai Persatuan

Nilai Permasyarakatan

Nilai Keadilan Sosial

NO	TGL DOK	NO DOKUMEN	DESKRIPSI	JUMLAH
96	09-01-25	486B048VVNNLF78Q	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	101.580,00
97	09-01-25	97EFB55DFIA1S9HN	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	844.417,00
98	13-01-25	1455F48VVNNNQI9G	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	123.700,00
99	15-01-25	4CD032G502IV0GEK	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	247.400,00
100	16-01-25	7FF4B48VVNNNQIQS	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	185.550,00
101	30-01-25	250181303000668 / 00057T	Potongan/Pembulatan SPM Belanja Pegawai	480,00
102	14-02-25	250181303001524 / 00128T	Potongan/Pembulatan SPM Belanja Pegawai	136,00
103	19-02-25	250181303001709 / 00160T	Potongan/Pembulatan SPM Belanja Pegawai	3.500.370,00
104	23-02-25	7D5641JNG83PGCQQ	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	5.420.000,00
105	21-03-25	AB78D3CIFTBM66EN	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	666.645,00
106	21-04-25	353757QLV2AIT2I2	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	615.150,00
107	21-04-25	33FB161QVD5Q3IIO	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	1.843.844,00
108	21-04-25	283E22G502S8F29B	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	2.226.000,00
109	22-04-25	0934F0NA0DNFL1VT	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember TA 2024)	160.810,00
110	03-06-25	250181303007773 / 00765T	Potongan/Pembulatan SPM Belanja Pegawai	1.000,00
111	16-07-25	259991330094951 / 01205T	Potongan/Pembulatan SPM Belanja Pegawai	329,00
TOTAL				40.368.558,00



2. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

NO	TGL DOK	NOMOR DOKUMEN	JUMLAH
1	10/01/2025	262D93CIFT5ABE17	18.519.800,00
2	06/02/2025	911E955DFICTR900	18.519.800,00
3	07/05/2025	B683548VVO3JME9L	10.503.000,00
4	20/03/2025	F96FF61QVD2KOO9J	18.519.800,00
5	05/06/2025	7243B6U8F7TK8LVS	23.149.825,00
6	15/04/2025	FE64C55DFIJ4R74N	18.519.800,00
7	26/05/2025	4983448VVO45H56E	2.300.000,00
8	26/05/2025	B29557QLV2DN54R4	8.053.600,00
9	26/05/2025	B96B148VVO45H4B1	1.024.000,00
10	26/05/2025	EB4AF61QVD8UB5JO	32.985.800,00
11	23/06/2025	0C6B91JNG8FSMOQP	10.000,00
12	25/06/2025	04F8F2G503291R5D	143.188.000,00
13	20/06/2025	1A4F51JNG8FO4HH2	1.644.000,00
14	01/07/2025	2E7A93CIFTKOU4VT	23.149.825,00
15	04/07/2025	6011F48VVO9FNBU7	90.000.000,00
16	24/07/2025	F17236U8F812FG1L	69.449.175,00
17	07/07/2025	B52150NA0E00CGU3	5.000.000,00
18	09/07/2025	AF3CB55DFIRVL0ME	16.400.000,00
19	10/07/2025	A160261QVDEC07EL	23.550.000,00
20	14/07/2025	8CB0355DFIRVL0JT	20.100.000,00
21	04/09/2025	3B87955DFJ1PKMSC	69.449.175,00
22	17/09/2025	4DE3F3CIFTTE4FT5	3.534.884,00
23	17/09/2025	6BA760NA0E68TG33	4.929.897,00
24	09/09/2025	0A5511JNG8ODF74I	600,00
TOTAL			622.500.981,00

3. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai

NO	TGL DOK	NOMOR DOKUMEN	JUMLAH
1	01/09/2025	7E1E361QVDK4KFMN	37.946.800,00
TOTAL			37.946.800,00

4. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin

NO	TGL DOK	NOMOR DOKUMEN	JUMLAH
1	14/04/25	A8F500NA0DN905I4	51.155.100,00
2	24/09/25	7B9690NA0E6FIIUK	261.600,00
3	04/12/25	D817C0NA0EEQL7GG	8.602.000,00
TOTAL			60.018.700,00



Lampiran VI.c : Daftar Rincian Persediaan

**Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Laporan Barang Persediaan
PER 31 DESEMBER 2025**

UAPB : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)
UAPPB-E1 : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
UAPPB-W : SATKER KONSOLIDASI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)

**LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2025
TAHUN ANGGARAN : 2025**

NAMA UAKPB : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
KODE UAKPB : 122.01.0199.403992

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2025
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	67,265,932
000001	Stabilo	1,385,280
000002	Post It Kecil	0
000003	Post It Sedang	1,052,280
000004	Post It Besar	730,380
000006	Rautan Pensil	3,012,200
000009	Sign Here	14,633,979
000010	Balliner Hitam	7,967,904
000013	Balliner Biru	9,352,000
000014	Pulpen Hitam	4,615,380
000015	Pulpen Biru	6,446,880
000017	Spidol Whiteboard Hitam	2,619,600
000018	Spidol Whiteboard Biru	3,196,500
000019	Spidol Whiteboard Merah	0
000020	Spidol Whiteboard Hijau	0
000027	Desk Set	1,306,800
000028	Pensil 2B	1,232,544
000029	Penghapus Pensil	1,221,000
000031	Tipe X Pentel	2,742,810
000032	Penggaris Besi 60 Cm	0
000033	Penggaris Besi 100 Cm	549,450
000034	Penggaris Mika 30 Cm	334,800
000035	Lem Stick Kertas	506,160
000042	Spidol Art Line Permanen Biru	0
000047	Isi Stapler No 3 Besar	637,140
000049	Spidol Permanen Putih	0
000054	Stabilo Boss	0
000057	Isi Stapler Kecil HD 10	478,965
000059	Tipe X Cair	619,380
000060	Pulpen Hitam Batik	0
000061	Pulpen Biru Batik	0
000062	Pulpen SignPro Hitam	1,232,500
000063	Pulpen SignPro Biru	1,392,000
1010301003	Penjepit Kertas	29,645,545
000001	Pembolong Kertas No 40 XL	5,527,800
000002	Binder clip 105	4,000,440
000003	Binder clip 107	0
000004	Binder clip 111	0
000005	Binder Clip 155	8,419,572
000006	Binder Clip 200	0
000007	Binder Clip 260	9,729,705



Nilai Ketuhanan



Nilai Kemanusiaan



Nilai Persatuan



Nilai Permasyarakatan



Nilai Keadilan Sosial

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

NAMA UAKPB : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KODE UAKPB : 122.01.0199.403992

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2025
000008	Trigonal Clip No.3 Kecil	961,260
000009	Trigonal Clip No.1 Besar	1,006,768
000011	Biner Clip 107 Pembulatan	0
1010301004	Penghapus/Korektor	914,650
000001	Penghapus White Board	914,650
1010301005	Buku Tulis	69,965,500
000001	Buku Besar Bergaris	34,210,000
000002	Buku Ekspedisi Bergaris	35,755,500
000003	Buku Agenda Kecil Hitam	0
1010301006	Ordner Dan Map	31,555,930
000001	Map Bening File F4	0
000003	Bantex Ring Binder	6,821,500
000004	Bantex Box File	4,898,985
000009	Stop Map BPIP Model A (Map Putih)	3,498,720
000010	Stop Map BPIP Model B (Merah Polos)	1,998,000
000012	Stop Map Model D (Merah Abu-abu)	0
000013	Bantex Pocket	0
000014	Map Kancing	0
000015	Pocketfile F4	7,631,250
000016	Map Bening Interx Folder	2,805,525
000017	Map Kertas A5	300,000
000018	Map Folder Arsip Biru	0
000019	Kertas A5	355,200
000020	Map Coklat Polos F4	832,500
000021	Map Coklat Logo F4	1,748,250
000022	Map Coklat Polos A4	0
000023	Map Coklat Logo A4	666,000
000024	Map Coklat Kop Kepala	0
000025	Map Kancing Folio	0
000027	Amplop Kepala 26x31	0
000028	Amplop Kepala 12x23,5	0
1010301007	Penggaris	1,199,910
000001	Penggaris Besi 30 Cm	1,199,910
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	6,087,060
000001	Cutter Sedang A300	1,777,110
000002	Cutter Besar L500	4,309,950
000003	Isi Cutter Sedang A100	0
1010301010	Alat Perekat	13,527,873
000001	Isolasi Bening Besar	1,432,233
000002	Isolasi Bening Kecil	136,500
000003	Lakban Coklat	1,531,800
000004	Lakban Hitam	4,981,680
000005	Lakban Bening	426,240
000006	Lakban Merah	5,019,420
1010301012	Staples	5,810,850



Nilai Ketuhanan



Nilai Kemanusiaan



Nilai Persatuan



Nilai Permasyarakatan



Nilai Keadilan Sosial

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

NAMA UAKPB : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KODE UAKPB : 122.01.0199.403992

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2025
000001	Steppler Kecil HD 10	3,613,050
000002	Steppler Besar HD 50	2,197,800
1010301014	Barang Cetakan	410,228,250
000005	Plakat BPIP	0
000006	Kalender Dinding	0
000007	Kalender Meja	0
000008	Plakat Resin	334,748,250
000009	Plakat Kayu	0
000010	Buku Pidato 1 Juni Soekarno	0
000011	Plakat Pimpinan	75,480,000
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	5,903,110
000001	Penyangga Buku Besi	1,221,000
000002	Box Arsip	0
000004	Label Tom and Jerry	0
000005	Tempat Celotip	172,920
000006	Gunting Sedang	1,487,400
000007	Double Tape Besar	1,919,190
000008	Double Tape Kecil	399,600
000009	Sticker Kemerdekaan 75	0
000011	Buku Saku Pengadaan Barang Jasa	0
000012	Materai	300,000
000013	Box Arsip 2	0
000014	Box Arsip	0
000015	Kertas Origami	403,000
1010302001	Kertas HVS	81,036,370
000003	A4 80 gr	59,510,430
000004	F4 80 gr	9,713,800
000006	A4 Warna Merah	3,405,000
000007	F4 70 gr	0
000008	A4 70 gr	0
000009	A5	1,303,140
000010	Kop A4 Logo Emas	0
000011	Kop Surat F4 Logo Emas	7,104,000
1010302004	Amplop	13,622,580
000001	Amplop Putih Kecil	3,036,960
000002	Amplop Putih Panjang	1,933,620
000004	Amplop Putih Polos 12x22	3,850,000
000005	Amplop Garuda 12x23,5	0
000006	Amplop Putih BPIP 12x23,5	0
000007	Amplop Putih BPIP 12x22 (Conqueror)	0
000008	Amplop Logo Bpip	4,025,000
000009	Amplop Coklat Folio Garuda dan BPIP	0
000010	Amplop Kepala Cancorde	0
000011	Amplop Kepala HVS	777,000
1010302005	Kop Surat	38,362,500



★ Nilai Ketuhanan

🚩 Nilai Kemanusiaan

🌳 Nilai Persatuan

🇮🇩 Nilai Permasyarakatan

👤 Nilai Keadilan Sosial

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

NAMA UAKPB : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KODE UAKPB : 122.01.0199.403992

KODE	U R A I A N	NILAI PER 31-12-2025
000012	Kop Surat F4 80gr Poli Emas Lambang Garuda dan BPIP	0
000013	Kop Surat A4 80 gr Poli Emas Lambang Garuda dan BPIP	38,362,500
000014	Kop BPIP Baru A4	0
000015	Kop BPIP Baru F4	0
1010303999	Bahan Cetak Lainnya	395,122,700
000001	Buku Pidato Naskah Pidato 1 Juni 1945	23,310,000
000002	Draft Buku Ajar BPIP TK/RA	0
000003	Draft Buku Ajar BPIP Paud	0
000008	Draft Buku Ajar SD	0
000011	Draft Buku Ajar SMP	0
000014	Draft Buku Ajar SMA	0
000016	Buku Pancasila Untuk Dunia	46,400,000
000017	Buku Naskah Pidato Bung Karno 1 Juni	0
000018	Buku Teks Utama Kls 1 s.d Kls 12	0
000019	Buku Teks Utama Pancasila	0
000020	Tote Bag Buku	0
000021	BlockNote Hitam	5,516,700
000022	BlockNote Merah	0
000023	BlockNote Putih	6,216,000
000024	Buku Akademik Usulan Jabatan Fungsional PIP	0
000025	Buku Pidato 1 Juni Putih	0
000026	Materi dasar PIP	18,990,000
000027	Salam Merdeka Salam Pancasila	11,745,000
000028	Buku Pidato To Build The World A New	0
000029	Buku TAP MPRS	56,925,000
000030	Buku Etika Pejabat Publik	25,520,000
000031	Pembulatan Buku 1 Juni	0
000032	Pembulatan Buku To Build The World A New	0
000033	Pembulatan TAP MPRS	0
000034	Pembulatan Buku Etika Publik	0
000035	Buku Naskah Sumber	118,000,000
000036	Pembulatan Soekarno To Build The World A New	0
000037	Buku Tafsir Soekarno	82,500,000
1010304004	Tinta/Toner Printer	855,038,140
000001	Toner CF26A	82,417,500
000002	Toner HP 410A Hitam	25,252,500
000003	Toner HP 410A Biru	50,172,000
000004	Toner HP 410A Merah	49,686,540
000005	Toner HP 410A Kuning	40,636,260
000006	Toner 204 Black	15,318,000
000007	Toner 204 Biru	19,058,700
000008	Toner 204 Merah	21,913,260
000009	Toner 204 Kuning	21,300,900
000011	Toner 85 A	0
000012	Toner 62 Warna	8,664,340



LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

NAMA UAKPB : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KODE UAKPB : 122.01.0199.403992

KODE	U R A I A N	NILAI PER 31-12-2025
000013	Toner 201 X Hitam	0
000014	Toner 201 X Biru	0
000015	Toner 201 X Kuning	3,100,000
000016	Toner 201 X Merah	6,200,000
000017	Toner 62 Hitam	6,872,603
000019	Toner 664 Hitam	0
000020	Toner 664 Biru	0
000021	Toner 664 Kuning	0
000022	Toner 664 Merah	0
000023	Toner 774 Hitam	0
000024	Tinta ID Card	18,750,000
000025	Tinta Hitam Fuji Xerox	70,139,790
000026	Toner 416 Hitam	30,387,289
000027	Toner 416 Biru	41,292,000
000028	Toner 416 Kuning	39,227,400
000029	Toner 416 Merah	48,655,008
000030	Tinta 289 Hitam	19,665,000
000031	Tinta 290 Warna	21,667,000
000032	Epson 001 Hitam	4,645,350
000033	Epson 001 Biru	3,410,000
000034	Epson 001 Merah	3,534,240
000035	Epson 001 Kuning	3,092,480
000036	Epson 001 Biru Pembulatan	0
1010304006	USB/Flash Disk	17,397,030
000003	Flashdisk 16 GB	17,397,030
000004	Flashdisk 128 Gb	0
000005	Pembulatan Flashdisk 16 Gb	0
1010304010	Mouse	28,230,800
000001	Mouse	59,000
000002	Mouse Wireless	28,171,800
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	1,089,000
000001	Keyboard	1,089,000
1010306001	Kabel Listrik	0
000003	Kabel NYM	0
1010306002	Lampu Listrik	69,091,500
000001	Lampu DownLight 15 W	2,400,000
000003	Lampu Tembak Projektor 200 Watt	4,650,000
000004	Lampu Colok	6,760,500
000005	Lampu Uilir 12 Watt	0
000006	Lampu Uilir 20 Watt	0
000008	Lampu TL Led 16 Watt	6,507,000
000009	Lampu TL 36 Watt	4,983,000
000010	Lampu Led Warna Drop Sealing	11,498,000
000013	Lampu Led Bulat	0
000014	Lampu Led Spotlight	116,000



LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

NAMA UAKPB : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KODE UAKPB : 122.01.0199.403992

KODE	U R A I A N	NILAI PER 31-12-2025
000015	Lampu Downlight	1,800,000
000016	Lampu Puter 19 Watt	13,810,000
000017	Lampu Downlight 12 W	2,340,000
000018	Lampu Ulin Puter	10,002,000
000019	Lampu Mayin	0
000020	Led Floodlight	0
000021	Lampu Sorot IP	3,700,000
000022	Lampu 3 Warna	0
000023	Lampu Sorot Taman	525,000
1010306003	Stop Kontak	632,000
000001	Stop Kontak	632,000
1010306004	Saklar	4,556,000
000001	Saklar	4,556,000
1010306006	Balast	3,672,000
000001	Ballast	3,672,000
1010306007	Starter	343,200
000001	Stater	343,200
1010306008	Vitting	4,050,000
000001	Rumah Lampu 5 Inchi	4,050,000
1010306010	Batu Baterai	15,241,944
000005	Batu Batre AAA Panasonic	0
000006	Batu Batre AAA Alkaline	5,557,104
000008	Batu Baterai AA Alkaline	8,484,840
000009	Batu Baterai D	1,200,000
1010306999	Alat Listrik Lainnya	70,394,000
000002	Kabel Roll	0
000003	Socket Lampu	24,000
000004	Cylinder Kunci	0
000005	Kapasitor AC	0
000006	Heater	0
000007	Steker	772,500
000008	Kabel NYM 3x2,5	0
000009	MCB	0
000011	Kabel Roll 50	0
000012	Colokan T	750,000
000013	Kabel NYM 2 x 1,5 50 M	2,400,000
000014	Fitting Lampu	1,170,000
000015	Kapasitor AC 1 PK Kaki 3	540,000
000016	Kapasitor AC 1 PK Kaki 2	487,500
000017	Kapasitor AC 2 PK Kaki 3	840,000
000018	Kapasitor AC 2 PK Kaki 2	720,000
000019	Solasi Listrik	675,000
000020	MCB 25 Ampere 1 Phase	1,805,000
000021	MCB 25 Ampere 3 Phase	5,850,000
000022	MCB 16 Ampere 1 Phase	1,505,000



Nilai Ketuhanan

Nilai Kemanusiaan

Nilai Persatuan

Nilai Permasyarakatan

Nilai Keadilan Sosial

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

NAMA UAKPB : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KODE UAKPB : 122.01.0199.403992

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2025
000023	Kabel 2 x 1,5 Uk 100 M	0
000024	Kabel 3 x 2,5 Uk 50 M	6,330,000
000025	Terminal	1,815,000
000026	Sikring TL	390,000
000028	PIPA AC 1 PK	12,000,000
000029	PIPA AC 2 PK	20,500,000
000030	Spiral AC	1,500,000
000031	Kapasitor 25 Mikro Kaki 2	1,250,000
000032	Kapasitor 25 Mikro Kaki 3	1,550,000
000033	Kapasitor Fan Outdoor	800,000
000034	MCB 10 Ampere 1 Phase	1,280,000
000035	MCB 32 Ampere 3 Phase	5,440,000
101030999	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	6,660,000
000001	Keyboard Wireless	6,660,000
1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	102,247,500
000002	Tumbler (Botol)	0
000003	Selang Flexible	0
000004	Kran Angsa	4,725,000
000005	Kran Taman	1,800,000
000006	Silinder Kunci	6,750,000
000007	Kait Jendela	0
000008	Selot Pintu	0
000009	Keset	0
000010	Tee Drat Luar	0
000011	Sock	0
000012	Knee Drat Emas	0
000013	Knee	0
000014	Seal Tape	2,300,000
000015	Sealant	300,000
000016	Jet Shower	6,562,500
000017	Kran Bak Mandi	0
000018	Bracket Tv	0
000019	Handle Fullset	7,500,000
000020	Handle Kamar Mandi Fullset	0
000021	Kunci Pintu Kaca	0
000022	Pipa PVC 2	0
000023	Aksesoris Pipa PVC	0
000024	Lem Pipa PVC	0
000025	Pipa AC	0
000026	Kunci Laci	2,100,000
000027	Handle Pintu Elektrik	18,000,000
000028	Plampung Closet	3,562,500
000029	Kran Wastafel	12,825,000
000030	Kran Biasa	2,947,500
000031	Kran Urinoir	6,637,500



LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

NAMA UAKPB : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
KODE UAKPB : 122.01.0199.403992

KODE	U R A I A N	NILAI PER 31-12-2025
000032	Shower Mandi	5,062,500
000033	Selang Air Ukuran 5/8 50m	1,300,000
000035	Solasi AC Non Lem	675,000
000036	Hollow Wall Anchor Fisher Gypsum	1,612,500
000037	Baut Gypsum	2,250,000
000038	Las Dop Kabel	75,000
000039	Akriik Penutup AC 2 PK	3,937,500
000040	Akriik Penutup AC 1 PK	3,375,000
000041	Kabel Ties Besar	525,000
000042	Kabel Ties Kecil	150,000
000043	Kabel Dak TC 4	450,000
000045	Lem Power Glue	520,000
000046	Lem Alkon	850,000
000047	Lem Pipa Isarplas	3,750,000
000049	Baut Kursi	600,000
000050	Hanger Kamar Mandi	1,105,000
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0
000001	Pengharum Ruangan	0
000002	Cairan Pencuci Piring	0
000003	Cairan Pel Lantai	0
000004	Kamper Bola	0
000005	Tissue Roll Toilet	0
000007	Tissue Muka Ruangan	0
000008	Sabun Cuci Tangan	0
000009	Spons Cuci Piring	0
000010	Cairan Pembersih Toilet	0
000011	Cairan Pembersih Kaca	0
000014	Cairan Pencuci Piring Pembulatan	0
000020	Sapu Lantai	0
000021	Sapu Lidi	0
000022	Pengki Plastik	0
000023	Pengki Seng	0
000024	Sikat Toilet Besar	0
000025	Sikat Wc Kecil	0
000026	Serok Air	0
000027	Alat Pembersih Kaca	0
000028	Lap Kanebo	0
000029	Lap Pel Lantai Miso	0
000030	Bendera	0
Jumlah per Akun		2,148,891,874
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	
1010501001	Pita Cukai, Materai, Leges	0
000001	Materai	0
Jumlah per Akun		0
117131	Bahan Baku	



LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

NAMA UAKPB : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KODE UAKPB : 122.01.0199.403992

KODE	U R A I A N	NILAI PER 31-12-2025
1010199999	Bahan Lainnya	0
000008	Kemoceng	0
000011	Masker Oksigen Merah BPIP	0
Jumlah per Akun		0
Total Jumlah		2,148,891,874

Keterangan

1. Persediaan senilai 0,- dalam kondisi rusak
2. Persediaan senilai 0,- dalam kondisi usang



★ Nilai Ketuhanan

🚧 Nilai Kemorosan

🌳 Nilai Persatuan

🇮🇩 Nilai Permasyarakatan

👤 Nilai Keadilan Sosial

Lampiran VI.d : Belanja Dibayar di Muka

NO	RINCIAN	NILAI	NILAI BELANJA DIBAYAR DI MUKA
1	Lisensi (Adobe, Freepik, Canva, Capcut, Envanto, Edwiser, WSDesk, Cirkle, Elfsight, ChatGPT, Github)	182.000.000,00	997.261,00
2	Lisensi Anti-Spam, Anti-Virus	116.100.000,00	17.385.533,00
3	Lisensi Zoom dan Zoom Workplace	87.690.000,00	480.493,00
4	Paket Data Seluler Pelacak Kendaraan	29.260.000,00	21.965.041,00
TOTAL		415.050.000,00	40.828.328,00



Nilai Ketuhanan

Nilai Kemanusiaan

Nilai Persatuan

Nilai Permasyarakatan

Nilai Keadilan Sosial

Lampiran VI.e : Transaksi RPATA Utang kepada Pihak Ketiga serta Dana Yang Dibatasi Penggunaannya & Penolakan Pengajuan SPM di Luar Batas Waktu

NO	RINCIAN	NILAI
1	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 06-SU/SP-PPK/BPIP/12/2024 untuk Pengadaan Jasa Lainnya Pengemudi Kendaraan Operasional dan Pramubakti BPIP TA. 2025	15.422.013,00
2	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 07-SU/SP-PPK/BPIP/12/2024 untuk Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Administrasi dan Receptionist BPIP TA. 2025	92.532.084,00
3	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor EP-01K1F7NE73AXJEG81GVQPFWYFN untuk Pengadaan Jasa Lainnya Pengemudi Kendaraan Operasional Tahun Anggaran 2025	272.498.590,00
4	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor EP-01K9S8E372TE3K7GSQGNJBAM2W untuk Pengadaan Jasa Lainnya tenaga Keamanan, Kebersihan dan Receptionist Kantor di Lingkungan BPIP Tahun Anggaran 2025	376.368.695,00
5	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor PO-396547-251222-1 untuk Pengadaan Belanja Barang berupa Vitamin, madu, dan Tumbler untuk Kebutuhan Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai Tindaklanjut Hasil medical Check Up (MCU)	307.359.000,00
6	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 01-SU/SP-PPK/BPIP/12/2024 untuk Pengadaan Langganan Jaringan ISP	694.800.000,00
TOTAL		1.758.980.382,00

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN****DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN**

Gedung Rajawali Pratapreksa I Lantai IV-J, Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710, Telepon: 821.9448333 Psw. 5704,
(021) 3812884 Surel: dpa@dpas.go.id Laman: www.dpa.kemkeu.go.id

Nomor : S-574/PB.2/2025
Sifat : Sangat Segera
Hal : Penolakan Pengajuan SPM di Luar Batas Waktu

28 Desember 2025

Yth. Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Jalan Veteran III No. 2
Jakarta Pusat

Sehubungan dengan surat Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui surat nomor 2152/KU/12/2025/D1.03 tanggal 24 Desember 2025 hal Permohonan Persetujuan Pengajuan SPM di Luar Batas Waktu, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Pengajuan SPM di luar batas waktu untuk SPM dengan rincian:

No	Kode/ Nama KPPN	Kode/ Nama Satker	Jenis SPM	SPM			Nama Bank Penerima	Alasan Keterlambatan
				Nomor	Tanggal	Nilai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	018/ KPPN Jakarta I	4038932/ Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Non Gaji Kontraktual	03225A	22-12-2025	Rp239.200.000	Bank Central Asia	Keterlambatan pengajuan tagihan oleh penyedia

tidak dapat disetujui karena telah melewati batas waktu penyampaian SPM sesuai dengan ketentuan.



Lampiran VI.f : Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar dan Beban
Pelepasan Aset Non Lancar

1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

NO	NTPN	NILAI
1	A8F500NA0DN905I4	51.155.100,00
2	7B9690NA0E6FIIUK	261.600,00
3	D817C0NA0EEQL7GG	8.602.000,00
TOTAL		60.018.700,00

2. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

NO	DESKRIPSI	NILAI
1	Microwave Oven	1.626.624,00
2	Kamera Stile	18.101.400,00
3	Lensa Kamera	11.568.000,00
4	Peralatan Studio Gambar Lensa	549.200,00
5	Lampu Blitz Kamera	2.352.000,00
6	Sofa	5.535.880,00
7	Lap Top	5.049.875,00
8	P.C. Komputer	3.267.875,00
TOTAL		48.050.854,00



**BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA**

